

KERABAT



Perubahan REGULASI HAJI



SUBBAG INMAS
KANWIL KEMENAG KALSEL

Edisi **84**
Catur Wulan II Tahun XI 2018



kanwilkalsel@kemenag.go.id



@kemenagkalsel



kalsel.kemenag.go.id



kemenagkalsel



@kemenagkalsel

Regulasi Haji

Oleh : H. Ahmad Kamal



Data penyelenggaraan Haji Tahun 1439 H/2018M yang diterima oleh Media Center Haji (MCH) Indonesia dari rilis Pemerintah Saudi menyatakan bahwa total jemaah Haji dari seluruh dunia yang datang ke Tanah Suci tercatat 2.371.675 orang, terdiri dari 612.953 jemaah Saudi dan 1.758.711 jemaah non-Saudi, untuk kategori jenis kelamin terdiri dari 1.327.127 jemaah laki-laki dan 1.044.548 jemaah perempuan.

Dengan tambahan 10.000 kouta/porsi Haji Indonesia pada musim Haji kali ini, sehingga mencapai jumlah 221.000 Jemaah, (dengan kouta Haji Regular 204.000 dan Haji Khusus 17.000), yang mana jumlah ini merupakan jumlah haji terbesar se-dunia dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga tak mudah untuk mengelola haji sebanyak itu. Hal ini tentunya menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama yang diberikan wewenang untuk melakukan persiapan dan perencanaan dengan tata kelola dan manajemen yang matang, serta penyelenggaraan Haji yang profesional untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada semua jemaah Haji Indonesia, agar indeks kepuasan jemaah meningkat dari tahun ke tahun.

Penyelenggaraan ibadah Haji dari tahun ke tahun memang terus mengalami dinamisasi dan ino-

vasi dalam segala sisi, terutama terlihat dari regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaannya. Pada tahun 2018 ini, kembali ditetapkan beberapa regulasi baru terkait dengan penyelenggaraan ibadah Haji, yang tentunya mengindikasikan bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sangat menginginkan dan memastikan bahwa Jemaah Haji Indonesia mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari penyelenggaraannya, terlihat dari hadirnya PMA Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, dan juga Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji reguler Tahun 1439H/2018M.

Dalam hal pelayanan Jemaah Haji, beberapa perubahan dapat dilihat pada lima komponen utama yang harus dipastikan dalam pelayanan Haji; akomodasi (pemondokan), transportasi, kesehatan, konsumsi (makanan), dan petugas Haji atau sumber daya manusia. Sebagai contoh inovasi yang dilakukan ialah percepatan pemeriksaan imigrasi (fast track) ketika kedatangan dan kepulangan Jemaah di Arab Saudi baik di Mekkah maupun di Madinah yang dilakukan dengan rekam biometriks pada embarkasi Haji di Indonesia, layanan catering/konsumsi yang didapatkan Jemaah sebanyak 40 kali selama berada di Mekkah, peralihan porsi Jemaah wafat kepada ahli waris, dan banyak lagi.

Kerabat edisi 84 kali ini, redaksi memuat tema besar "Perubahan Regulasi Haji" dengan kupasan tulisan-tulisan yang memberikan informasi kepada pembaca mengenai peningkatan pelayanan ibadah Haji 1439 H/2018 M.

REDAKSI Kerabat

PEMBINA : Drs. H. Noor Fahmi, MM
 PENANGGUNG JAWAB : Drs. H. Muslim, M.Pd.I
 REDAKTUR : H. Ahmad Kamal, S.HI, M.Ag
 PENYUNTING/EDITOR : Badariyah, S.Ag.
 DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER : Rajudin, S.AP
 SEKRETARIAT (Pengumpul Bahan/Artikel):
 Jain Rahman, S.Kom, Marianti, SEI.
 SEKRETARIAT
 (Dokumen) :Rahma Widiyawati, SE
 (Editing) Rhoma Wiaya, SH.I, Eka Susana, SE.
 (Distribusi) Iwan Setiawan, S.Kom,
 Akhmad Ramadhan, S.Kom,

Ijin Terbit:

SK. Menpan RI No 1958/DITJEN BPG/SPP/1993. Tanggal 27 Desember 1993

Penerbit : Sub. Bagian Informasi dan Humas

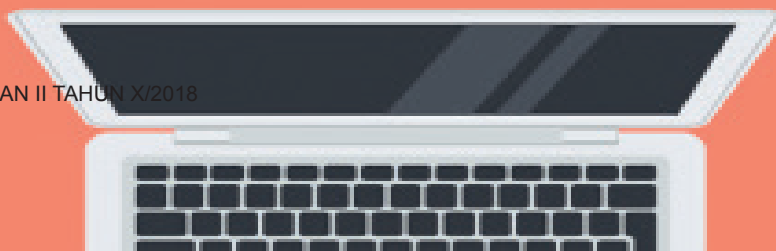
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

Jl. D.I. Panjaitan No. 19 Banjarmasin. Telp. (0511) 3353472 / 085245677171

Email : kanwilkalsel@kemenag.go.id

Dicetak Oleh :

CV. IZZ BORNEO GRAFIKA



Tahun 1439 H/2018 M, Jemaah haji Indonesia secara resmi diikuti sebanyak 203.351 haji regular dan 16.905 haji khusus, yang merupakan jumlah terbesar se-dunia dibandingkan dengan negara-negara lain. Para tamu Allah ini akan tinggal di Makkah 28 Hari, di Armina 4 Hari, dan di Madinah 8 hari. Sehingga keseluruhan perjalanannya sebanyak 40 hari.

Tujuan dari lahirnya regulasi baru tentang penyelenggaraan ibadah Haji ialah keinginan dan tekad yang kuat untuk memberikan kepuasan yang lebih dirasakan oleh Jemaah Haji Indonesia dalam hal peningkatan pembinaan, pelayanan dan perlindungan pada musim Haji 1439 H/2018 M. Hal ini tentunya dapat dilihat dari beberapa inovasi yang dirasakan langsung sebagai sebuah peningkatan yang signifikan dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah Haji pada tahun ini. Secara tersirat hadirnya regulasi ini sebagai petunjuk teknis penyelenggaraan Haji ini dapat dilihat dari beberapa sisi.

Pertama, Akomodasi. Komitmen Kementerian Agama menyediakan pemondokan (maktab) Jemaah haji Indonesia baik di Makkah maupun di Madinah adalah penginapan sekelas hotel bintang tiga dengan segala fasilitas yang dimilikinya. Sistem sewa akomodasi pun satu musim penuh di Madinah. Selama ini, sistem sewa seperti itu hanya diterapkan di Makkah. Di Madinah, sewa akomodasi dilakukan secara blocking time. Mulai tahun ini, 52,02% jemaah akan ditempatkan di 32 hotel yang disewa satu musim penuh. Artinya, hotel menjadi hak jemaah Indonesia secara penuh tidak dibagi dengan negara lain.

Setiap kamar dapat ditempati paling banyak 5-6 orang. Walaupun di Makkah, jarak antara tempat penginapan dan masjid al-haram beragam, ada yang 1 Km lebih dekat dan lebih jauh hingga 4 Km, tetapi hal ini dapat diantisipasi dengan disediakannya Bis Sholawat (sholat lima waktu) yang selalu berkeliling selama 24 jam menghantar Jemaah haji Indonesia setiap 10 menit sekali menjemput jemaah haji yang ingin menuju Masjid al-Haram.

Akomodasi yang krusial sesungguhnya pada saat di Arafah dan Mina, di mana hampir 3 juta lebih jemaah se-dunia berkumpul untuk Wukuf. Jemaah haji Indonesia regular sudah berangkat ke Arafah pada tanggal 8 Dzulhijjah, mereka menginap di tenda-tenda yang telah disediakan yaitu 2 hari 1 malam di Arafah dan 3 hari 2 malam di Mina. Maka akomodasi jemaah Haji dengan sarana prasarana yang disediakan membutuhkan perhatian yang ekstra Pemerintah. Tahun ini, tenda yang disediakan sudah dapat dianggap semi permanen dengan pondasi tiang-tiang bangunan tenda dari besi kokoh, walaupun dengan ruang yang masih terbatas pun masih sangat sempit sehingga dalam tenda itu jemaah haji kita berjejer dan harus berhimpitan. Fasilitas yang disediakan di tenda Arafah hanya kipas angin dengan blower yang tak dapat mengurangi tingkat panasnya udara yang sangat tinggi yang temperaturnya kurang lebih 40-45 derajat celcius. Sedangkan di Mina, tenda Jemaah sudah permanen dengan AC yang memadai, walaupun juga terasa ruangnya sangat sempit karena Jemaah yang sangat banyak. Jaraknya tenda pondokan Jemaah cukup jauh dari tempat melepas jumroh (jamarat). Pemerin-

tah Arab Saudi menempatkan tenda Jemaah haji Indonesia sebagian masih ada di wilayah Mina Jadid, sekitar 2-4 Km menuju jamarat, dengan jalan di balik terowongan Al-Moeasim.

Kedua, transportasi. Ter-dapat inovasi yang sangat baik di bidang transportasi tahun ini. Pemeriksaan imigrasi jemaah haji telah dilakukan di embarkasi Indonesia. Pemeriksaan biometric dan sidik jari dilakukan di masing-masing asrama haji di daerah tempat asrama haji berasal. Ini sangat membantu antrian panjang dan lamanya pemeriksaan haji di Bandara Jeddah maupun di Bandara Madinah Arab Saudi. Tahun-tahun sebelumnya, pemeriksaan di Arab Saudi bisa memakan waktu 4-5 jam. Namun, dengan pemeriksaan imigrasi di Indonesia, ketika di imigrasi Arab Saudi cukup memakan waktu 30-60 menit. Sehingga jemaah haji Indonesia dapat langsung ke Bis untuk diberangkatkan ke masing-masing penginapan.

Adapun transportasi darat, secara umum bis yang digunakan untuk membawa Jemaah haji dari Bandara ke penginapan, Makkah-Madinah, Madinah-Makkah, Makkah-Arafah-Muzdalifah-Mina-Makkah dan Bis Sholawat, sudah dirasakan oleh Jemaah lebih nyaman, aman dan memadai dengan bis pabrikan paling tua tahun 2013. Hal ini tentu menambah kenyamanan dan kepuasan jemaah haji Indonesia di perjalanan selama di tanah suci.

Ketiga, konsumsi. Pada musim Haji 1439 H/2018 M ini, Jemaah haji Indonesia mendapatkan makanan sebanyak 40 kali di Makkah, 18 kali di Madinah dan 18 kali di Armi-

na, dan 1 kali di Jeddah. Tentu pemberian makanan ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Komitmen Kementerian Agama dalam hal makanan yang diberikan ini harus menyesuaikan dengan citarasa Indonesia dengan mengandung gizi yang standar dengan menu yang bervariasi. Selain itu, ada juga penambahan pemberian kelengkapan minuman dan makanan berupa teh, gula, kopi, saos sambel, kecap dan satu potong roti untuk setiap jemaah. Sementara *dan* living cost sebesar SAR 1500, tetap diberikan penuh sebagaimana biasa sehingga bisa digunakan jemaah untuk keperluan lain.

Keempat, kesehatan. Dalam statistik jamaah haji Indonesia tahun ini disebutkan pengidap penyakit resiko tinggi sebanyak 66,55 sekian % dari jumlah haji yang berangkat. Di lihat dari sisi usia prosentase jumlah jemaah Haji Indonesia terdiri atas < 41-50 tahun 38 %, 51-60 tahun 35,4%, dan 61 tahun > 27%. Banyaknya usia lanjut usia dalam rombongan Haji Indonesia ini tentu beresiko banyaknya keluhan sakit dari jemaah. Dibutuhkan pelayanan kesehatan yang memadai. Tercatat ada 2038 tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat. Di setiap kloter disediakan 1 orang dokter dan 1 orang perawat. Terdapatnya posko kesehatan di setiap Sektor dengan fasilitas kesehatan terbatas.

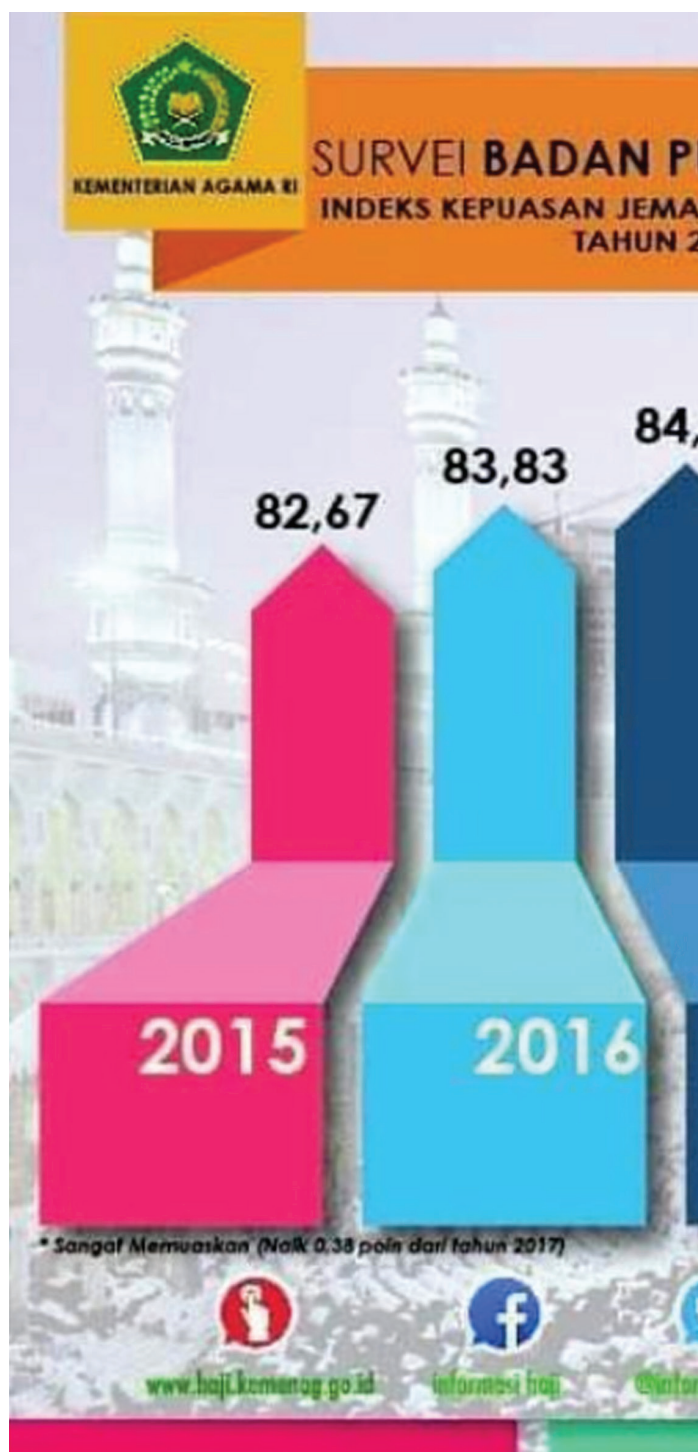
Di samping itu, tahun ini dibentuk juga tim Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (P3JH). Tim ini terdiri dari petugas layanan umum yang memiliki kemampuan medis. Diisi oleh petugas dari rumah sakit haji, prodi kedokteran UIN Jakarta, serta rumah sakit

TNI/Polri. Tim ini disiapkan untuk mendukung layanan kesehatan pada puncak haji, utamanya pada hari pertama lontar jumrah.

Namun, jika membutuhkan rujukan dengan penyakit yang tidak dapat ditangani dokter kloter dan Sektor, mereka akan dirujuk ke KKHI (Klinik Kesehatan Haji Indonesia), baik KKHI ini ada di Mekkah dan Madinah, kalau pun juga tidak mampu untuk ditangani oleh KKHI maka akan dirujuk lagi ke RS Arab Saudi.

Kelima, SDM Petugas Haji. Jumlah tenaga haji Indonesia tahun ini sebanyak 4.756 orang yang terdiri atas 2.718 dari Kementerian agama dan 2.038 dari Kementerian Kesehatan. Petugas haji yang ditugaskan sebagai petugas kloter sebanyak 2.535. Mereka menyertai Jemaah haji sesuai dengan kloternya. Petugas kloter haji ini meliputi Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan Tim Pembimbing Haji Daerah (TPHD). Sementara petugas haji non-kloter sebanyak 1.041 orang dan petugas pendukung sebanyak 1.180 orang.

Jumlah petugas haji ini lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang 3.500 petugas haji. Dengan jumlah Jemaah yang mencapai 204.000 haji regular, rasio kebutuhan dengan jumlah petugas haji yang ada memang belum



sepenuhnya dapat melayani jamaah haji Indonesia, tetapi dengan dedikasi dan integritas yang tinggi, para petgas Haji dapat memberikan pelayanan secara optimal yang memuaskan kepada Jemaah Haji Indonesia 1439 H/2018 M kali ini, salah satu contoh gunamengintensifkan

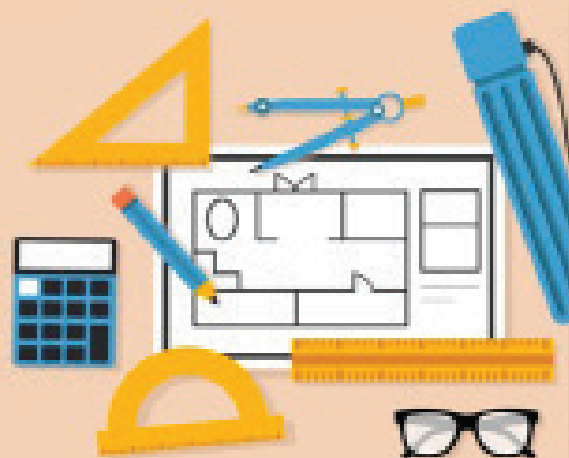
layanan bimbingan ibadah, ditempatkanlah satu konsultan ibadah di tiap sector yang diharapkan bisa bersinergi dengan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) yang ada di tiap kloter.

"inovasi yang dilakukan

merupakan upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan bagi jemaah. Dengan harapan, bahwa Jemaah Haji bisa beribadah dengan tenang, memperoleh kemabruran, serta kembali ke Tanah Air dalam kondisi sehat," ucap Menag Lukman Hakim Saifuddin.



daftar isi



Cover.....	01
Editorial dan Redaksi	02
Topik	03 - 05
Daftar Isi	06 - 07
Topik Utama	08 - 27
 FOTO KERABAT	 30 - 31
BERITA NASIONAL	32 - 35
BERITA PROVINSI	36 - 39
BERITA DAERAH	40 - 51
 COVER BELAKANG	 52



Ka. Kanwil Kemenag Kalsel H. Noor Fahmi bersama Bersama Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor, saat menyambut kedatangan Jamaah Haji Debarkasi Banjarmasin. di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, (24/09)



Perubahan Regulasi Haji

08

.....
Drs. H. NOOR FAHMI, MM
Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Selatan



Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1439 H/2018 M

12

.....
Drs. H. ZAINAL MUTAQIN, MM
Kasubbag TU Kementerian Agama Kota Banjarmasin



Perspektif Istitha'ah Haji Kontemporer

14

.....
Drs. H. MUSLIM, MPd.I
Kabag TU Kanwil Kementerian Agama Kalsel



Mengapa Harus Umrah dan Haji Khusus

17

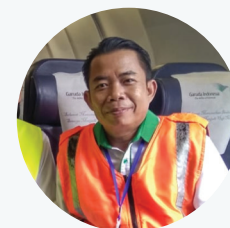
.....
H. ZAINAL ARIFFIN, S.Ag. M.Ikom
Kasi Bina Haji Kanwil Kemenag Kalsel



Inovasi Menyongsong Visi Haji Arab Saudi Tahun 2030

21

.....
Drs. H. Faisal, M.HI
Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin



Perlunya Memahami Istitha'ah

25

.....
Drs. H. Hidayatullah, M.Ikom
Kasi Sistem Informasi Haji Kanwil Kemenag Kalsel



10 Inovasi Baru untuk Ibadah Haji 2018

27

.....
Drs. H. Matnor, M.Pd
Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenag Kalsel

Perubahan Regulasi Haji

Oleh : H. Noor Fahmi



Berbicara tentang haji maka berbicara tentang ibadah rukun Islam yang dilaksanakan di waktu tertentu dan di suatu daerah tertentu dan hanya diwajibkan hanya dilaksanakan satu kali seumur hidup. Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Maka

pelaksanaannya memerlukan beberapa persyaratan baik lahir maupun batin. Memerlukan suatu persyaratan tertentu yang harus dipenuhi lagi karena negara Indonesia mengatur beberapa ketentuan yang mengikat bagi para calon jamaah haji karena pelaksanaannya tidak dilaksanakan di Indonesia, melainkan di luar negeri yaitu di negara Arab Saudi. Tentunya ada aturan-aturan yang dibuat dan harus ditaati oleh kedua negara. Dalam kaitannya dengan ibadah haji yang

dilaksanakan di Arab Saudi maka menyangkut juga dengan hukum internasional, hukum kontrak internasional dan juga perjanjian internasional antara negara Indonesia dengan negara Arab Saudi. Juga mengenai beberapa regulasi yang ada di Indonesia mengenai pelaksanaan ibadah haji

Penyelenggaraan Haji sebagai tugas nasional, secara implisit disebutkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 menjadi tugas dan kewenangan Kementerian

Agama. Diantara alasannya haji merupakan salah satu dari kegiatan keagamaan. Terlaksananya tugas-tugas tersebut, diperlukan aspek manajemen yang menuntut profesional penyelenggaraan merupakan tantangan bagi Kementerian Agama. Adanya seperangkat kebijakan tentang program perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi. Karena itu program penyelenggaraan haji semestinya dikawal dari sisi agama dan budaya, namun haruslah diatur oleh sistem manajemen atau pengelolaan haji yang berkeadilan, transparan dan akuntabel.

Untuk terselenggara ibadah haji dengan tertib, aman bagi umat Islam Indonesia, pemerintah telah menetapkan regulasi dan peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan haji tersebut. Di sisi lain pemerintah Arab Saudi mengeluarkan peraturan tentang penyelenggaraan haji yang dikenal dengan Taklimatul

Haji. Regulasi ataupun taklimatul haji yang harus dipatuhi oleh jamaah haji dan pemerintah yang mengirimnya dari berbagai penjuru dunia.

Jumlah jamaah haji yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan melebihi kuota yang ditetapkan, maka diperlukan pengaturan dan penataan yang akurat dan tepat oleh pemerintah Indonesia sebagai negara pengirim dan Arab Saudi sebagai penerima. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji bukan hanya menjadi tanggung jawab Arab Saudi tetapi juga negara-negara asal jamaahnya. Pemahaman tentang regulasi haji dan taklimatul haji bagi penyelenggara haji sangatlah penting sebab mereka merupakan bagian dari penyelenggara negara. Dengan memahami peraturan perundang-undangan perhajian tersebut, maka para petugas penyelenggara haji dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab yang telah

menjadi job kerjanya.

Pengertian dan Urgensi Regulasi Penyelenggaraan Haji

Secara bahasa, Regulasi berarti peraturan, diartikan tatanan, petunjuk, ketentuan yang dibuat untuk mengatur (KBBI;2008). Menurut istilah, regulasi penyelenggaraan ibadah haji didefinisikan sebagai pengaturan atau tatanan, petunjuk, kaidah, ketentuan yang diadakan untuk penyelenggaraan ibadah haji. Sedangkan isi dari regulasi tersebut peraturan hukum, peraturan pemerintah, peraturan Presiden, keputusan dan peraturan menteri, keputusan dirjen dan ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga terkait (Achmad Nidjam;2011:9).

Regulasi haji adalah segala peraturan yang mengatur berbagai rangkaian kegiatan dalam melaksanakan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 pasal

BANTU JAMAAH

Ka. Kanwil Kemenag Kalsel menyambut dan membantu /mengangkat barang jamaah haji saat menuruni tangga pesawat pada acara kedatangan di Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin





Ka. Kanwil Kemenag Kalsel selaku Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Banjarmasin, saat memimpin rapat Evaluasi Fase Keberangkatan Jamaah Haji Embarkasi Banjarmasin.

1 ayat (2) menyebutkan penyelenggaraan ibadah haji adalah “rangkai kegiatan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji”. Sedangkan Taufik kamil (2003) mengemukakan bahwa penyelenggaraan haji adalah suatu sistem kegiatan dengan sub sistemnya yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pendaftaran, pembinaan, kesehatan, keimigrasian, transportasi akomodasi, penyelenggaraan haji khusus dan umrah. Penyelenggaraan haji sesuai dengan tuntutan perundang-undangan haruslah mengacu pada prinsip manajemen modern yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan.

Komponen yang dimuat dalam sebuah regulasi

sekurang-kurangnya memuat 3 (tiga) landasan yaitu:

1. Landasan filosofis;
2. Landasan Yuridis; dan
3. Landasan Sosiologis.

Menurut Rosjidi Rangawidjaja (1998;43) menyatakan regulasi yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan regulasi di atasnya. Sementara Rahayu (2009) menyebutkan bahwa perlindungan hukum diberikan subjek hukum dalam bentuk perangkat yang bersifat preventif maupun represif. Sehingga perlindungan hukum adalah sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat dan kedamaian.

Penerapan perundang-undangan tentang penyelenggaraan haji diharapkan mampu menjadikan

proses penyelenggaraan haji di era transparan lebih kompetitif, efisien, efektif dan akuntabel. Oleh karenanya regulasi penyelenggaraan haji akan ditentukan oleh;

1. Memiliki materi hukum yang baik dan kuat, karena didukung oleh kebutuhan masyarakat dan tidak pula bertentangan dengan perundang-undangan nasional.
2. Memiliki pelaksana yang integritas, profesional, dan tanggung jawab.

Disisi lain, Kementerian Agama sebagai penanggung jawab penyelenggara haji harus mampu memberi contoh dan teladan bagi masyarakat untuk menegakkan dan menumbuhkan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan

yang berlaku. Regulasi dan pengaturan penyelenggaraan ibadah haji merupakan bagian hal penting yang ikut berperan dalam mensukseskan dan mencapai keberhasilan mengelola pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya. Dengan memahami regulasi tersebut semakin jelas siapa mengerjakan apa, apa dan bagaimana mengerjakannya, bila dan kapan waktunya, sehingga semakin jelas mengelola, mengemas perhelatan akbar yang dikerjakan di negeri orang lain, menelan biaya cukup banyak, mengumpulkan banyak orang dan rentang waktu lama. Perubahan demi perubahan dilakukan demi terselenggaranya pelaksanaan ibadah haji yang baik dan tercapainya suatu kepuasan tersendiri bagi para jamaah haji yang telah pulang melaksanakan ibadah haji. Dibutuhkan adanya suatu landasan sebagai instrumen dalam penyelenggaraan ibadah haji tersebut yaitu adanya asas dan tujuan penyelenggaraan ibadah haji.

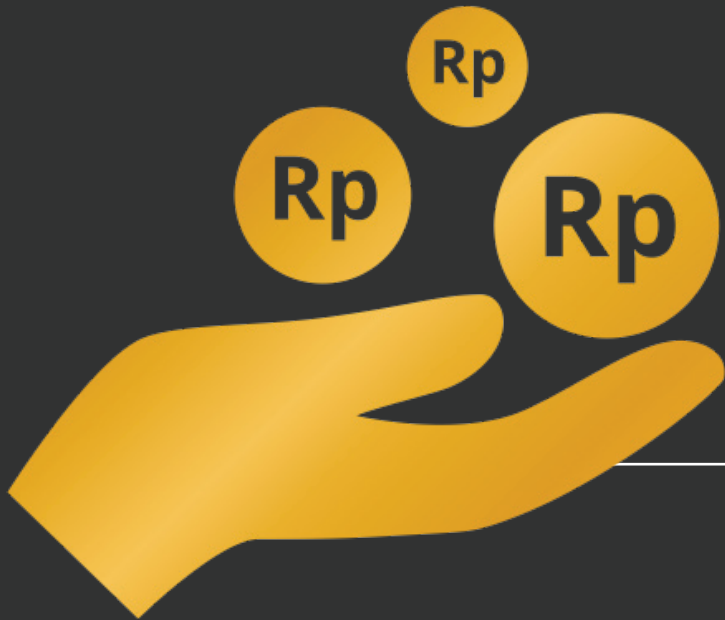
1. Asas Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji pasal 2 menyebutkan penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan asas keadilan memperoleh kesempatan, perlindungan dan kepastian sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

2. Tujuan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Yang dimaksud dalam tujuan yang dimaksud disini adalah tujuan penyelenggaraan haji oleh pemerintah. Sebagaimana telah tercantum dalam tujuan penyelenggaraan ibadah haji menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 adalah memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Hal ini dikarenakan negara bertanggung jawab melayani atas segala keperluan para calon jamaah haji hingga mereka selesai melaksanakan ibadah haji tersebut. Oleh karena itu, pembinaan dan pelayanan yang telah dimaksud dalam pasal 3 tersebut adalah seluruh jamaah haji diberangkatkan ke tanah suci, mendapatkan pemondokan, diwukufkan di Arafah dan dikembalikan lagi ke tanah suci.

Hal ini adalah standar minimal pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Perlindungan yang dimaksud disini adalah menjamin terjaganya keamanan dan kenyamanan para jamaah haji mulai dari berangkat dari tanah air sampai ke tanah suci hingga mereka melaksanakan segala keperluan ibadah haji kemudian kembali lagi ke tanah air selamat dari segala gangguan baik teror maupun keselamatan dalam perjalanan. Oleh karena itu, para petugas yang mempunyai job tugas dan pekerjaan di bidang penyelenggara haji, sudah semestinya mereka mengetahui secara rinci mengenai regulasi penyelenggaraan haji. Dengan pemahaman petugas penyelenggara haji secara baik, akan maksimal pula pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna jasa haji. Hal itu akan dapat meningkatkan citra pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia yang melayani di hadapan masyarakat.





Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1439H/2018M

Oleh : H. Zainal Muttaqin

Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp. 65.863.929,-

1. Direct Cost = Biaya yg dibayar langsung oleh Jamaah Haji;
2. Indirect Cost = Biaya yg tidak dibayar oleh Jamaah, Tetapi dibebankan pada hasil optimalisasi setoran awal BPIH atau hasil yg dikelola oleh Kemenag/ BPKH dari setoran awal jamaah.

Direct Cost untuk Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 sebesar : Rp. 38.157.084,-

Biaya yg dibayar jamaah (Direct Cost) sebesar : Rp. 38.157.084,- tersebut digunakan utk membayar :

1. Tiket Pesawat PP sebesar : Rp. 30.417.324,-
2. Pemandokan di Makkah sebesar : Rp. 2.384.760,-
3. Living cost: Rp. 5.355.000,- (SAR 1500). Diserahkan kembali kepada jamaah pada saat di Embarkasi.

Terus Biaya untuk :

1. Membayar selisih p e m o n d o k a n di Makkah Sebesar Rp. 13.501.740,- (3 . 7 8 2 SAR) yg seharusnya biaya itu sebesar : Rp. 16.079.280,- (4 . 5 0 4 SAR) tetapi jamaah hanya membayar Rp. 2.384.760,- (722 SAR);
2. M e m b a y a r Pemandokan di Madinah (selama 8 Hari)
3. General service;
4. Upgrade Transportasi;
5. Makan 2 kali sehari di Madinah selama 8 Hari;
6. Makan di Makkah sebanyak 40 kali (2 x sehari);
7. Makan di Arafah, 4 kali, di Muzdalifah snack berat, makan di Mina, 11 kali;
8. Makan di Bandara Jeddah /Madinah saat datang dan



9. pulang; Pelayanan bongkar muat dan angkutan barang (hadamat);
10. Badal Haji dan pemulangan jamaah sakit pasca operasional;
11. Konsumsi saat jamaah di Asrama Haji;
12. Akomodasi saat di Asrama Haji
13. Biaya Penerbitan Paspor

- (Rp. 360.000,-);
14. Pengadaan dan pendistribusian DAPIH
15. Pengadaan dan pengiriman gelang Identitas/pakai barkot;
16. Buku Paket Manasik
17. Biaya Manasik Haji (Di kabupaten kota sebanyak 2 kali, di KUA Kec. Sebanyak 8 kali)
19. Insentif Ketua Rombongan Rp 1.000.000,--dan Ketua Regu Rp. 500.000,-
20. Bayar premi asuransi jiwa dan kecelakaan.

Semua Biaya diatas tidak dibayar oleh Jamaah alias Gratis. Terus yg bayar siapa ?

Semua Biaya diatas dibayar menggunakan Dana Optimalisasi setoran awal (Indirect Cost) atau keuntungan... Jumlahnya / jamaah Rp. 27.706.845,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) Bersyukurlah jamaah haji yg berangkat tahun ini, 1 (satu) orang jamaah mendapat uang optimalisasi 27 juta. lebih berupa layanan baik di dlm

negeri maupun di luar negeri.

Loh berarti Biaya Haji Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 65.863.929,-? Jawabnya Betul sekali. 65 juta lebih , akan tetapi jamaah hanya membayar 38.157.084,-

TAPI ya wajarlah, uang setoran jamaah sebesar 20 juta kan sudah lama mengendap di Bank. Pasti sudah "berkembang" ???

Baik, mari kita hitung bersama sama. Jamaah haji yg berangkat tahun 2018, rata rata mendaftar haji pada tahun 2009 ahir atau sampai dengan Pebruari 2010, berarti uang 20 juta sdh mengendap selama 9-10 tahun. Sekarang apabila Bapak/Ibu memiliki uang 20 juta terus didepositokan ke Bank, dan Bank memberi bunga yg rata-rata 5-6% maka uang 20 juta selama 9 tahun akan bertambah menjadi kurang lebih : 25 jutaan (dilebihkan) dg bunga bank sebesar Rp. 5-6% atau 5 jutaan apalagi kemudian potong pajak.. Artinya uang 20 juta akan bertambah jutaan saja (maaf kalo salah ngitung bunganya)

Padahal jamaah haji tahun ini menikmati dana bagi hasil karena semua dana haji dimasukan atau dinvestkan ke bank2 syari'ah/SBSN syari'ah/sukuk syari'ah (bahasa kasarnya "bunga" bahasa halusnya "optimalisasi" sebesar 25 jutaan. Artinya satu jamaah haji tahun ini walaupun uangnya sdh mengendap di Bank selama 9 tahun tetap saja masih kurang sebesar 27.706.845,-

Pertanyannya Uang dari mana ??

Inilah duit yg dikelola oleh pemerintah yg sekarang pengelolaanya ditangani oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) yg mana sebelumnya dikelola oleh Kemenag ...dan biaya haji tahun ini dibandingkan dgn tahun kemaren kenaikannya hanya Rp. 345.290,-

Semoga bermanfaat dan dapat memberikan penjelasan kepada tetangga, rekan atau keluarga yg menanyakan kemana dan diapakan saja uang saya oleh Pemerintah..wallahu a'lam bi shawab...mei'18 @info_haji Kemenag Bjm (Z.Muttaqin)



Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Banjarmasin Seksi Perbekalan saat menyerahkan uang living cost kepada jamaah Haji

Perspektif Istitha'ah Haji Kontemporer

Oleh : H. Muslim



Musim haji 1439 H/2018 M baru saja berlalu. Para jemaah haji pun sudah pulang ke tanah air, begitu pula para penyelenggara haji yang ditugaskan oleh Kemenetrian Agama dalam berbagai bidangnya. Harapan kita semua, dan hal ini pula yang didambakan oleh seluruh jemaah haji dan keluarganya adalah mereka beroleh predikat haji yang mabrur, yang ditandai dengan peningkatan kualitas keimanan, ketaqwaan dan amal saleh di dunia, yang tidak ada balasan di akhirat kecuali sorga.

Selain peningkatan kuantitas jemaah haji yang terus meningkat dari tahun ke tahun,

sehingga daftar tunggunya semakin lama dan panjang, kualitas penyelenggaraan haji pun dinilai semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun serta tanggapan para jemaah haji itu sendiri.

Meskipun demikian, semua pihak tidak boleh berhenti dan merasa puas sampai di situ saja. Harus dilakukan upaya-upaya peningkatan, baik dari sisi penyelenggara dan yang tidak kalah pentingnya adalah dari sisi jemaah, supaya mereka yang berhaji benar-benar istitha'ah dalam arti sebenarnya, tidak sahja dari segi kemampuan finansial, tetapi juga dari aspek lain, seperti

pemahaman terhadap manasik haji dan sebagainya.

Perspektif Istitha'ah

Sebagai Rukun Islam kelima, ibadah haji merupakan ibadah yang istimewa dan komprehensif. Shalat dan puasa ibadah badan, zakat dan sedekah merupakan ibadah harta, maka ibadah haji merupakan gabungan antara ibadah badan dan harta. Bahkan kalau dilihat dari perspektif tasawuf, ibadah haji juga kental dengan nuansa spiritual-sufistik.

Sesuai ketentuan syariat, syarat orang berhaji meliputi Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, dan mampu. Syarat wajib haji yang sangat menentukan adalah di segi



H. Muslim saat memberikan arahan pada proses penerimaan fase keberangkatan JCH Tahun 1439 H /2018 M

kemampuan. Menurut mazhab Syafi'i, mampu terbagi dua: Pertama, istitha'ah binnafsi, mampu mengerjakan haji dengan dirinya sendiri, yaitu memiliki bekal yang cukup serta nafkah keluarga tanggungannya, kemampuan transportasi, perjalanan yang aman, dan bagi wanita ada mahram. Kedua, istitha'ah bilghair, yaitu mampu berhaji dengan perantara orang lain, misalnya karena sakit parah, lumpuh, berlakulah badal haji. Orang yang meninggal tapi mampu berhaji, ahli waris atau orang lain dapat mengerjakan hajinya (Masyhuri, 1996: 122-125).

Mampu dipahami melalui dua perspektif, dari sudut pribadi orang yang akan berhaji atau faktor internal. Seseorang dikatakan mampu bila memiliki keuangan atau biaya, tidak

mempunyai hutang dan sehat. Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar pribadi orang yang akan berhaji, meliputi keamanan dan transportasi (Nidjam dan Ismail, 2007: 131).

Imam Syafii dan Muhammad bin Hasan, berpendapat, kewajiban haji bisa diakhirkan dan ditangguhkan dengan syarat ia harus mengerjakannya sebelum meninggal dunia. Jika ia meninggal padahal mampu dan belum mengerjakan haji, berarti ia berdosa besar. Argumennya karena ibadah haji baru diwajibkan Allah pada tahun ke-5, ke-6 atau ke-7 Hijriah, dan Nabi sendiri baru melakukannya pada tahun ke-10 H (Haji Wada'). Sebelumnya beliau menunjuk Abu Bakar sebagai ketua rombongan haji, padahal Nabi sendiri mampu melakukannya. Imam Abu

Hanifah, Malik dan Ahmad lebih menekankan pada segi kemampuan mengerjakan haji. Jika sudah mampu berhaji, dan tidak melaksanakannya, ia berdosa (Ayyub, 2000: 8).

Meskipun ada pendapat beribadah haji boleh ditunda, sebaiknya menunaikan ibadah haji langsung dilaksanakan begitu ada kemampuan, tidak ditunda-tunda atau diakhirkan, sebab kita tidak tahu masa yang akan datang, bisa saja kemampuan materi hilang, kemampuan fisik berkurang, bahkan meninggal dunia. Karena ibadah haji banyak terkait dengan kesehatan fisik, maka begitu seseorang mampu berhaji, makin cepat lebih baik. Berhaji ketika masih muda dan sehat tentu lebih baik ketimbang berhaji di usia tua dan ketika fisik sudah menurun.

KERABAT UTAMA

Pentingnya Manasik Istitha'ah yang juga harus dipenuhi calon jamaah haji secara individu (internal) adalah: pengetahuan tentang manasik haji. Karena itu orang-orang yang akan berhaji harus rajin belajar, melakukan simulasi, baik dengan bimbingan petugas maupun belajar secara mandiri, banyak membaca buku dan sebagainya. Dan setelah berada di tanah suci hendaknya memanfaatkan waktunya secara optimal untuk keperluan yang memang berkaitan dengan ibadah.

Selama ini masalah pengetahuan manasik masih banyak kelemahan, padahal ia merupakan hal penting dan termasuk penentu kemabruran haji. KH Hasyim Muzadi menyoroti, jemaah haji Indonesia banyak yang mengabaikan aspek manasik dan kekhusyuan ketika melaksanakan ibadah haji. Perhatiannya banyak terkait urusan lain, seperti makan,

minum, berbelanja, urusan keluarga atau berfoto-fotonya, sehingga hal tersebut dapat mengurangi kemabruran haji yang efek positifnya kurang terasa setelah tiba di tanah air, baik dalam bentuk kesalahan individual maupun sosial.

Dari uraian singkat di atas jelas bahwa persyaratan utama untuk bisa menunaikan ibadah haji adalah mampu di segi biaya, kesehatan jasmani dan rohani, kelancaran transportasi dan keamanannya serta didukung dengan pengetahuan yang memadai, baik pengetahuan manasik maupun hal-hal yang bersifat teknis dan administratif.

Seseorang yang melaksanakan ibadah haji ibarat prajurit yang sedang bersiap-siap terjun ke medan perang. Perang bagi para tamu Allah (dhuyuf al-Rahman) ini tentu tidak dengan pedang atau segala macam persenjataan. Perang yang dilakukan adalah perang melawan diri sendiri dan inilah perang terberat

dari semua perang yang harus kita hadapi. Sekembali dari Perang Badr, Nabi Saw berkata kepada sahabat beliau, kita baru saja kembali dari sebuah peperangan besar (jihad akbar), akan tetapi ada perang (jihad) yang lebih besar lagi setelah ini. Para sahabat bertanya: apa itu, Ya Rasulullah? Nabi menjawab: Jihadun-Nafs (perang melawan diri sendiri, nafsu).

Selama dalam perjalanan dan ketika berada di tanah suci tentu banyak masalah ditemui, banyak hal yang bisa membuat kesal, kecewa bahkan marah kepada orang lain. Di sisi lain tentu juga ada keinginan untuk berbuat fusuq, rafats dan jidal, Semua ini tentu membutuhkan kesabaran, kemampuan mengendalikan emosi, dan di sinilah perlunya kemampuan memerangi hawa nafsu. Jadi, pengendalian hawa nafsu, tak hanya sewaktu menjalankan ibadah puasa, tetapi saat berhaji pun sangat dibutuhkan. Wallahu Alam.



Mengapa Harus Umrah dan Haji Khusus

Oleh : H. Zainal Ariffin

A. Latar Belakang

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, dan menjadi dambaan setiap muslim untuk melaksanakannya, tentunya bagi yang telah memenuhi persyaratan mampu atau istitha'ah baik secara finansial, mental, fisik, pengetahuan tentang manasik dan kesempatan, hal ini sejalan dengan firman Allah surah Ali 'Imran ayat : 97 yang artinya: Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah (Q.S. Ali 'Imran : 97)

Di Kalimantan Selatan daftar tunggu (Waiting List) Calon Jemaah Haji sudah memasuki angka lebih dari 106.674 ribu orang (data 1 Oktober 2018), secara hitungan kasar 106.674 (angka waiting list) dibagi 3.831 (kuota pertahun) masa tunggu sudah mencapai 27 tahun, bahkan lebih.

Melihat kepada kondisi di atas, maka umrah maupun haji khusus menjadi salah satu solusi dalam rangka mengobati kerinduan ummat terhadap Baitullah, yang selama ini dan selamanya menjadi kiblat ummat Islam dalam shalat. Dahulu yang namanya Haji Khusus itu seolah-olah hanya untuk orang kaya dan berduit saja, sekarang tidak seluruhnya benar sebab ada saja yang harus menjual sawah, kebun atau lainnya demi untuk bisa pergi haji walau harus bayar mahal (melalui haji khusus), atau mungkin keluarganya yang



patungan membiayai orang tuanya sehingga bisa pergi haji walaupun harus bayar mahal (Haji Khusus), sebab kalau haji reguler menunggu terlalu lama, itupun kalau usia masih ada.

Demikian halnya dengan Umrah, menjadi salah satu sarana untuk mengobati kerinduan terhadap baitullah, walau tidak harus haji. Nah inilah yang menjadi daya tarik bagi pemilik Biro Perjalanan Wisata (BPW) untuk melakukan ekspansi usahanya berupa program yang berorientasi wisata religi berupa layanan umrah dan haji khusus. Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus ini tentunya harus dilakukan oleh BPW

yang sudah mengantongi izin operasional dari Kementerian Agama. Di Kalimantan Selatan BPW yang sudah mengantongi izin dari Kementerian Agama baik sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) maupun Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) sebanyak 47 BPW, termasuk sebagai kantor cabang. Dari 47 BPW tersebut yang hanya sebagai penyelenggara umrah (PPIU) sebanyak 28 BPW, sedangkan yang sebagai penyelenggara Umrah (PPIU) dan Haji Khusus (PIHK) sebanyak 19 BPW. Dari 47 BPW itu yang asli izin operasionalnya di Kalimantan Selatan sebanyak 32 BPW, sedangkan yang selebihnya 15 BPW berstatus cabang.



H. Zainal Arifin, saat menerima pernyataan sikap dari Aksi Damai JUMARAT VFS-TASHEEL di Aula Kanwil Kemenag Kalsel.

B. Peran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

1. Peran Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam hal perizinan penyelenggaraan umrah dan haji khusus adalah:

a. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)
Dalam hal perizinan BPW untuk menjadi PPIU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan hanya sebatas memberikan rekomendasi, setelah dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan. (PMA No 8 Tahun 2018 pasal 6).

Rekomendasi diberikan kepada BPW yang mengajukan permohonan untuk mendapat izin

operasional sebagai PPIU dari Menteri Agama, dengan persyaratan berupa:

Surat permohonan perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dengan melampirkan:

- 1) Potocopy Akta Notaris pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang bergerak di bidang keagamaan/perjalanan ibadah yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
- 2) Potocopy surat keterangan domisili perusahaan

dari Pemerintah Daerah dengan melampirkan bukti kepemilikan atau sewa menyewa paling singkat 4 (empat) tahun yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalitas dari Notaris.

- 3) Potocopy tanda daftar usaha pariwisata
- 4) Potocopy bukti telah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun sebagai biro perjalanan wisata.
- 5) Potocopy sertifikat usaha jasa perjalanan pariwisata yang masih berlaku;
- 6) Potocopy Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
- 7) Potocopy surat keterangan fiscal dan Potocopy NPWP Perusahaan dan Pimpinan Perusahaan;
- 8) Potocopy Laporan keuangan perusahaan yang sehat 2 (dua) tahun

terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

- 9) Potocopy Surat Rekomendasi dari instansi Pemerintah Daerah Provinsi yang membidangi pariwisata yang masih berlaku.
- 10) Potocopy KTP dan biodata seluruh pemegang saham dan anggota Direksi.

Catatan :Kanwil Kemenag hanya berwenang memberikan rekomendasi, setelah visitasi lapangan.

Disamping pemberian rekomendasi Kantor Wilayah Kementerian Agama juga membuatkan pengesahan pembukaan kantor cabang dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Surat permohonan perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- 2) SK Penetapan/izin sebagai PPIU dari Menteri Agama.
- 3) Akta notaris pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan Surat Keterangan telah terdaftar sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.
- 4) Akta notaris pembukaan kantor cabang
- 5) Surat Keterangan Dimisili Usaha (SKDU) kantor cabang dari Pemerintah Daerah Setempat yang masih berlaku.
- 6) Potocopy KTP dan biodata Pemilik Perseroan/Perusahaan.
- 7) Potocopy Nomor pokok wajib pajak.
- 8) Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian

Agama kabupaten/Kota.

- 9) Surat pernyataan pakta integritas.

- b. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.

Untuk BPW yang sudah menjadi PPIU dan mau ditingkatkan menjadi PIHK Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan hanya memberikan surat keterangan bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir tidak pernah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah umrah (pasal 2 PMA No 23 Tahun 2016).

Surat Keterangan diberikan kepada BPW yang sudah menjadi PPIU dan akan ditingkatkan untuk mendapat izin operasional sebagai PIHK dari Menteri Agama, dengan melampirkan persyaratan sbb:

- 1) Surat permohonan dari pimpinan dengan Kop Perusahaan ditujukan kepada Bapak Ka Kanwil Kemenag;
- 2) Potokopi izin PPIU yang masih berlaku;
- 3) Potokopi izin usaha pariwisata;
- 4) Potokopi Nomor Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan NPWP Direktur Utama dan/atau Direktur;
- 5) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM;
- 6) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- 7) Surat Rekomendasi dari Instansi Pemerintah Provinsi yang membidangi Pariwisata;
- 8) Struktur Organisasi Perseroan Terbatas;
- 9) Potokopi Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit

oleh Kantor Akuntan Publik, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

- 10) Bukti telah menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah paling singkat selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah jemaah umrah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
- 11) Surat Keterangan dari Kantor Wilayah yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir pemohon tidak pernah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah umrah;
- 12) Hasil Akreditasi PPIU dalam 3 (tiga) tahun terakhir minimal terakreditasi dengan nilai (B)
- 13) Fotokopi Bank Garansi atas nama biro perjalanan wisata sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Bank BPS BPIH dan berlaku selama 4 (empat) tahun;
- 14) Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban sebagai PIHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping pemberian keterangan Kantor Wilayah Kementerian Agama juga membuatkan persetujuan pembukaan kantor cabang haji khusus dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Surat permohonan perusahaan yang ditandatangani oleh Dirut, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- 2) SK Penetapan/izin sebagai PIHK dari Menteri Agama;
- 3) Potocopy akta notaris

KERABAT UTAMA

pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan Surat Keterangan telah terdaftar sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Ham;

- 4) Potocopy akta notaris pendirian kantor cabang PIHK;
- 5) Surat Penunjukan kepada Pimpinan Kantor Cabang PIHK;
- 6) Rekomendasi dari Asosiasi PIHK;
- 7) Persyaratan ketentuan Pemerintah Daerah setempat;
- 8) Poto copy KTP dan biodata kepala cabang PIHK;
- 9) Nomor pokok wajib pajak.

2. Peran Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam hal pencegahan terjadinya penipuan umrah dan haji khusus.

Dalam hal pencegahan terjadinya penipuan baik umrah maupun haji khusus Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan melakukan beberapa upaya antara lain;

- a. Menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umrah baik melalui media elektronik maupun media cetak.
- b. Mengadakan acara sosialisasi yang berkaitan dengan peraturan dan kebijakan mengenai haji dan umrah dengan mengundang perangkat kelurahan dan desa, dimana diharapkan perangkat kelurahan dan desa yang menjadi peserta sosialisasi tersebut menjadi agen informasi

atau penyambung lidah Kementerian Agama mengenai haji dan umrah bagi masyarakatnya.

- c. Menyampaikan data terbaru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan melalui group WA Bidang PHU dan Kasi PHU Kalimantan Selatan. Data ini diharapkan menjadi rujukan bagi aparat (ASN) Kemenag dalam menyampaikan informasi bila ada calon Jemaah umrah atau haji khusus yang menanyakan travel yang terdaftar di Kementerian Agama.

C. Kiat menghindari penipuan Umrah dan Haji Khusus

Untuk menghindari penipuan baik umrah maupun haji khusus hampir sama, yakni terletak pada ketelitian dari si calon Jemaah bersangkutan dalam memilih travelnya, atau dengan kata lain teliti sebelum membeli. Kiat yang paling sederhana adalah apa yang disebut dengan 5 (lima) pasti yaitu:

- a. Pastikan Travelnya berizin, dengan menanyakan langsung kepada pihak pengelola travel atau kepada karyawan travel.
- b. Pastikan penerbangan dan jadwalnya; tanyakan kepada pihak travel atau karyawannya mengenai armada pesawat yang akan digunakan dalam penerbangan dari dan ke tanah suci, berikut jadwal penerbangannya, termasuk

mengenai kemungkinan transit. Transit yang diperbolehkan hanya sekali, diluar penerbangan Banjarmasin ke Jakarta, jika keberangkatannya dari Jakarta.

- c. Pastikan program layanannya; tanyakan kepada travel atau karyawannya program yang ditawarkan, misalnya apakah paket standar, paket istimewa, paket VIP atau lainnya, paket sekamar berdua, bertiga, berempat, berikut biayanya.
- d. Pastikan hotelnya; tanyakan kepada travel atau karyawannya apakah hotel bintang 3, bintang empat atau bintang 5, termasuk nama hotel berikut alamatnya (jauh dekatnya dari Haram).
- e. Pastikan paspornya sudah divisakan; tanyakan kepada travel atau karyawannya apakah paspor sudah divisakan, jika belum berarti belum ada kepastian kapan berangkat.

Di luar 5 (lima) pasti tersebut yang tidak kalah pentingnya adalah sekiranya ada keinginan untuk melaksanakan ibadah umrah maupun haji khusus dan mau memastikan terdaftar tidaknya travel yang mau diikuti dalam melaksanakan umrah maupun haji khusus datanglah ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan tanyakan langsung ke Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah atau langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tanyakan langsung pada Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah atau kunjungi situs www.kalsel.kemenag.go.id. Prov. Kalsel.

Inovasi Menyongsong Visi Haji Arab Saudi Tahun 2030

Oleh : H. Faisal



Selama ini, Arab Saudi mungkin memandang sebelah mata secara ekonomi terhadap haji dan umrah, karena selama puluhan tahun mereka dimanja dengan minyak. Hampir 80 % pendapatan negara itu berasal dari ekspor minyaknya, sehingga negara Saudi dijuluki sebagai Negara Petro Dolar.

Namun, ketika tren harga minyak dunia terus menurun, Saudi pun mulai kalang kabut. Bayangkan, harga minyak dari

125 dolar per barelnya pada Maret 2012 turun menjadi 50 dolar perbarel saat ini, walaupun akhir-akhir ini ada tren harga minyak naik, tapi tidak terlalu banyak. Akibatnya Arab Saudi pun mengalami defisit anggaran mencapai 98 milyar dolar AS.

Untuk mengatasi defisit anggaran yang diakibatkan dari turunnya harga minyak dunia, tam biaya-biaya lain yang besar seperti perang melawan Yaman, Kabinet Arab Saudi melaku-

kan Reformasi Ekonomi secara menyeluruh, yang bertujuan untuk mengalihkan negara itu dari ketergantungan kepada minyak sebagai sumber pendapatan negara, salah satunya adalah jasa pelayanan haji dan umrah. Reformasi itu diberi nama Visi Saudi 2030 dan Pangeran Mohammad bin Salman bin Abdul Aziz sebagai tokoh penggagasnya.

Dalam Visi 2030 tersebut, Kerajaan Arab Saudi menancangkan peningkatan jumlah jemaah haji dan umrah secara signifikan. Jemaah umrah yang kini mencapai sekitar 5-10 juta orang pertahun, pada tahun 2030 direncanakan bisa mencapai 30 juta orang. Demikian pula dengan haji, kapasitas haji yang kini hanya mencapai sekitar 5 juta jemaah pertahun, pada tahun 2030 ditargetkan bisa mencapai 30 juta orang.

Sebagai konsekuensinya, Arab Saudi harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. memperluas dan memperbaiki berbagai fasilitas haji dan umrah seperti Masjidil Harom, Mathaaf (Tempat Thawaf), Mas'a (Tempat Sa'i), Jamaraat (Tempat Pelontaran) serta perkemahan baik di Arafah maupun di Mina.

Perluasan Masjidil Harom dan Mathaaf (Tempat Thawaf) sudah dilaksanakan sejak tahun 2013, sedangkan Mas'a (Tempat Sa'i) dan Jamaraat (Tempat Pelon-

KERABAT UTAMA

taran) diperluas dan dibikin bertingkat, perkemahan di Arafah telah dibuat permanen dengan bahan tahan api dan kokoh, dan perkemahan di Mina selain diperluas kemungkinan besarnya akan dibikin bertingkat juga agar mampu menampung 30 juta jemaah.

2. membangun berbagai sarana penunjang lainnya, seperti jalan tol, kereta api, hotel dan jaringan air bersih.

Pembangunan jalan tol, kereta api, hotel dan jaringan air bersih sudah berjalan dan kini sudah banyak yang selesai, seperti kereta api di Masyair (Arafah-Muzdalifah-Mina) telah selesai dan digunakan terutama untuk jemaah haji dari negara-negara Teluk. Adapun Kereta Api Cepat antar kota, yakni Jeddah-Mekkah-Madinah telah diresmikan oleh Raja Salman pada tanggal 25 September 2018 yang lalu. Kecepatan kereta api ini bisa mencapai 320 km perjam, sehingga jarak antara Mekkah dan Madinah bisa ditempuh hanya sekitar 1 jam 30 menit, yang selama ini memakan waktu 4 sampai dengan 5 jam dengan bus.

3. melakukan percepatan semua layanan, terutama di bandar udara, baik Jeddah maupun Madinah. Dalam rangka percepatan layanan di bandara tersebut, ada beberapa terobosan baru yang diberlakukan oleh Pemerintah Arab Saudi pada musim haji tahun 2018, antara lain :

- a. Percepatan layanan keimigrasian di bandara King Abdul Aziz Jeddah dan bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Ma-

dinah, dengan melakukan pengambilan foto biometrik dan sidik jari serta pre-departure clearance di Embarkasi, yang sebelumnya dilaksanakan di bandara Jeddah atau Madinah oleh petugas Imigrasi Arab Saudi. Pada tahun 2018, Indonesia menjadi pilot-projeck untuk pelaksanaan program tersebut. Embarkasi Jakarta dipercaya untuk melaksanakan pengambilan foto biometrik dan sidik jari serta pre-departure clearance, sehingga jemaah haji dari Embarkasi tersebut ketika sampai di Saudi Arabia, tidak lagi melalui pemeriksaan paspor oleh Imigrasi Arab Saudi, tetapi mereka menggunakan jalur FAST TRACK (Jalur Cepat), di mana setelah turun dari pesawat langsung ke bus setelah pemeriksaan tas cabinnya dengan mesin X-Ray. Selain itu koper bagasi mereka diangkut dengan truk. Sedangkan embarkasi haji lainnya (Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Solo, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar dan Lombok) dan 4 Asrama Haji Embarkasi Antara (Bengkulu, Lampung, Palangka Raya, Gorontalo baru dipercaya untuk melakukan pengambilan foto biometrik dan sidik jari saja, sehingga ketika sampai di Saudi Arabia, masih harus melalui pemeriksaan paspor oleh Imigrasi Arab Saudi untuk proses clearance paspornya dan pemeriksaan tas cabin dan koper bagasinya dengan mesin X-Ray, baru ke bus. Proses layanan seperti di atas, dapat me-

mangkas waktu kurang lebih 4 jam.

- b. Pemerintah Arab Saudi tidak lagi mengizinkan jemaah haji untuk bertahan di plaza bandara Jeddah atau Paviliun di bandara Madinah. Mereka menginginkan setelah turun dari pesawat, jemaah haji langsung naik bus yang akan mengantarkan mereka ke hotel baik di Mekkah maupun Jeddah, tanpa memperhatikan regu dan rombongan, jemaah disuruhnya masuk untuk memenuhi 1 bus dan langsung diberangkatkan, baru mengisi bus berikutnya dan begitu seterusnya. Akibat penerapan aturan Arab Saudi ini adalah :



Jemaah haji di bandara Madinah ataupun Jeddah rentan akan terpisah rombongan, regu bahkan suami-isteri ketika naik bus yang mengantar mereka ke hotel. Kalau kloternya dalam satu hotel, mungkin masih bisa untuk berkumpul kembali ketika sampai di hotel, tapi kalau kloternya terpecah dalam beberapa hotel, maka akan mendapatkan kesulitan untuk berkumpul kembali. Oleh karena itu, disarankan hal-hal sebagai berikut : 1) Tempat duduk jemaah dalam pesawat harus diatur per regu/rombongan. 2) Ketika sampai di Saudi Arabia, jemaah turun dari pesawat per-rombongan dengan aba-aba dari Pramugari. 3) Bagi Jemaah Non-Fast Track, setelah turun dari pesawat langsung masuk ke semua Counter pemeriksaan Imigrasi, tidak menumpuk pada

1 counter, agar keluar dari pemeriksaan Imigrasi bersamaan dalam satu rombongan. Demikian juga ketika pemeriksaan barang, jemaah harus berpecah kesemua mesin X-Ray yang tersedia, sehingga keluar pemeriksaan barang bisa bersamaan. 4) Keluar dari pemeriksaan barang harus berbaris satu rombongan menuju menuju bus. 5) Ketua regu dan rombongan harus berperan aktif agar jemaahnya tidak terpisah sejak turun dari pesawat sampai naik bus.

Bagi jemaah gelombang kedua yang mendarat di bandara Jeddah, tidak akan mempunyai kesempatan lagi untuk berpakaian ihram di Jeddah, apalagi mandi sunnat Ihram, karena akan langsung disuruh naik bus, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana

jemaah diperbolehkan berlama-lama di plaza sehingga masih mempunyai waktu untuk berganti pakaian dengan pakaian ihram. Oleh karena itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah memerintahkan agar jemaah melakukan mandi Sunnat Ihram, berpakaian Ihram dan shalat Sunnat Ihram sejak di Asrama Haji Embarkasi, sehingga ketika sampai di bandara King Abdul Aziz Jeddah tinggal berniat saja.

Inovasi Penyelenggaraan Haji Indonesia

Tidak kalah dengan Saudi Arabia, Indonesia juga melakukan beberapa inovasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah hajinya sejak tahun 2014, di antaranya :



Gambar : Gedung Zabal Rahmah UPT Asrama Haji Embarkasin Banjarmasin di Banjarbaru

KERABAT UTAMA

1. Revitalisasi Asrama Haji seluruh Indonesia ;
2. Penyewaan Hotel di Makkah dan Madinah minimal hotel Bintang 3, dengan jarak maksimal 500 meter dari Masjid Nabawi di Madinah (Ring 1);
3. Pengadaan layanan Bus Shalawat (bus antar jemput antara hotel dan Masjidil Haram) di Makkah;
4. Up-Grade Bus Antar Kota (Madinah-Makkah-Jeddah) ;
5. Penerbangan jemaah gelombang pertama langsung ke Madinah, serta pemulangan jemaah haji gelombang kedua langsung dari Madinah.

Kelima inovasi tersebut telah terlaksana dengan baik sejak tahun 2015.

Selanjutnya Kementerian Agama juga melakukan 10 inovasi baru pada penyelenggaraan haji tahun 2018 yang lalu sebagai berikut :

1. Percepatan Keimigrasian, di mana rekam foto biometrik jemaah haji yang semestinya dilakukan oleh petugas Imigrasi Arab Saudi di bandara Jeddah atau Madinah, dilakukan di Asrama Haji Embarkasi. Bahkan untuk Embarkasi Jakarta telah dilakukan Pre Clearance Immigration di Bandara Soekarno Hatta, sehingga jemaah hajinya mendapat fasilitas layanan FAST TRACK (layanan cpat), yaitu ketika sampai di Arab Saudi turun dari pesawat tidak lagi melalui pemeriksaan imigrasi Arab Saudi, tapi bisa langsung naik bus. Rencananya Pre Clearance Immigration ini akan dilakukan di semua Embarkasi pada

tahun 2019 ;

2. Penggunaan QR Code pada gelang jemaah identitas jemaah haji. Dengan adanya QR Code data jemaah haji pemilik gelang tersebut akan bisa dibaca lengkap oleh petugas kita dengan HP, sehingga petugas bisa memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat. Namun dalam Rapat Evaluasi Nasional Penyelenggaraan Haji pada tanggal 2-4 Oktober yang lalu, terungkap beberapa kelemahan dari pada QR Code itu, sehingga diusulkan untuk tahun 2019 agar menggunakan RFID ;
3. Penyewaan akomodasi (hotel) dengan sistem Full Musim (52%) di Madinah, di mana sebelumnya penyewaan tersebut dilakukan dengan sistem Blocking Time. Penyewaan akomodasi (hotel) dengan sistem Blocking Time ini mempunyai kelemahan yang sangat berpengaruh kepada layanan jemaah kita, karena sebelum dimasuki jemaah kita, hotel tersebut bisa diisi oleh jemaah dari negara lain, sehingga ketika jemaah kita datang, hotel belum siap. Atau sebaliknya, sesudah diisi oleh jemaah haji kita, hotel akan diisi oleh jemaah dari negara lain, sehingga jemaah kita didesak untuk segera keluar kamar oleh pihak hotel. Oleh karena itu pada tahun 2018 yang lalu sebanyak 52 % hotel di Madinah disewa dengan sistem Full Musim, dan insya Allah pada tahun 2019 100 % hotel di Madinah akan disewa dengan sistem Full Musim ;
4. Penggunaan bumbu masakan dan juru masak (chef)

asal Indonesia. Hal ini, selain untuk menjaga cita rasa kuliner Indonesia, juga untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Luar Negeri. Dan diusulkan pada tahun 2019 akan menggunakan bumbu masakan daerah ;

5. Penambahan layanan Katering bagi jemaah haji di Makkah menjadi 40 kali ;
6. Penandaan khusus pada paspor dan koper serta penggunaan tas cabin ;
7. Pencetakan Visa bisa dilakukan di Kemenag RI, dan diusulkan pada tahun 2019 pencetakan Visa bisa dilakukan di Kanwil Kemenag Provinsi ;
8. Pengalihan Porsi bagi calon jemaah wafat kepada ahli waris ;
9. Penempatan Konsultan Ibadah pada setiap Sektor. Konsultan ini diharapkan bisa bersinergi dengan TPIHI Kloter.
10. Membentuk tim Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (P3JH) untuk membantu layanan kesehatan pada puncak haji, utamanya pada hari pertama lontar jumrah.

Demikian beberapa inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji, agar dapat melaksanakan ibadah hajinya dengan lancar, aman, selamat dan benar sesuai tuntunan agama, sehingga bisa menjadi haji yang mabrur. Amin.

Perlunya Memahami Istitha'ah

Oleh : H. Hidayatullahman



H. Hidayatullahman (kanan) bersama Ka.Kanwil Kemenag Kalsel di Kabin Pesawat JCH Embarkasi Banjarmasin.

Penyelenggaraan operasional ibadah haji tahun 1439 H/ 2018 M Embarkasi Banjarmasin secara umum telah berjalan dengan sukses. Tidak hanya dilihat dari jumlah jamaah yang telah diberangkatkan dan kembali dengan selamat, sehat dan telah berkumpul dengan anggota keluarga di tanah air, bahkan ada kesan positif yang terlontar dari jamaah haji yang sering kita terima. Kendati demikian, masih ada sejumlah catatan yang perlu disoroti dan dicarikan solusinya untuk pelaksanaan yang lebih baik pada musim haji tahun 1340 H/ 2019 M yang akan datang.

Terkait dengan kondisi kebugaran jamaah. Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) untuk masa keberangkatan tahun 1439 H/ 2018 M, secara umum dari 3.831 Jamaah Calon Haji (JCH) asal Kalimantan Selatan yang berumur 18 sd 40 tahun

berjumlah 724 orang. Umur 40 sd 50 tahun sebanyak 2.650 orang dan umur 60 sd 80 tahun sebanyak 457 orang.

Dari data di atas, berdasarkan realita lapangan catatan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Banjarmasin terdapat 2.673 jamaah calon haji yang dinyatakan Resiko Tinggi (risti) dengan klasifikasi Kasus terbanyak adalah Hypertensi 36 %, Hyperkolesterol 27% dan lain-lain Senility, Cardiomegali, Anemia dan Dispepsia.

Dari 3.831 alokasi JCH yang rencana diberangkatkan, ada 4 orang yang tunda atau batal berangkat dari daerah dikarenakan sakit, meninggal dan pendamping dari jamaah yang sakit dan 1 orang tunda keberangkatan sewaktu di embarkasi dikarenakan sakit. Sehingga total jamaah calon haji yang diberangkatkan sebanyak 3.826 orang dan didampingi 60

orang petugas.

Sebagai gambaran, pada fase pemberangkatan ada 10 orang JCH yang tunda sementara (mutasi ke kloter berikutnya) karena harus mendapatkan perawatan dan 9 JCH pendamping yang sakit dengan klasifikasi kasus terbanyak anemia.

Banyaknya kasus anemia yang ditemui menjelang keberangkatan jamaah menuju Arab Saudi memang sempat menjadi perhatian kita bersama dan hal tersebut sangat jarang ditemui pada tahun-tahun sebelumnya. Walau semua JCH tunda bisa diberangkatkan namun sempat membuat khawatir Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Banjarmasin, apalagi menjelang masa berakhirnya operasional pemberangkatan.

Ibadah haji diwajibkan bagi setiap muslim dan

KERABAT UTAMA

muslimah yang mampu (istitha'ah). Istitha'ah ini menjadi salah satu syarat wajib haji. Ada beberapa aspek bagi jamaah disebut istitha'ah yaitu mencakup aspek finansial dan kesehatan.

Secara finansial, calon jamaah dikatakan Istitha'ah jika memiliki cukup harta selama perjalanan untuk keperluan makanan dan kendaraan untuk dirinya sendiri, maupun bagi keperluan keluarga yang ditinggalkan selama ke Tanah Suci. Selanjutnya, keperluan jamaah itu sendiri setelah kembalinya dari haji.

Dari aspek kesehatan, kemampuan fisik dan rohani yang sehat menjadi faktor yang harus diperhatikan bagi calon jamaah haji. Permenkes No.15 tahun 2016 telah mengatur soal istitha'ah kesehatan jamaah haji. Yang mana di dalamnya dijelaskan, bahwa istitha'ah kesehatan jamaah haji memiliki makna kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan. Sehingga, jamaah bisa menjalankan ibadah haji sesuai dengan syariat agama Islam.

Permenkes soal istitha'ah haji ini telah diterapkan dan diperkuat dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Nomor 4001 tahun 2018 tentang Persiapan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Negeri Tahun 1439 H/ 2018 M pada bagian B poin 4 yang mengatakan bahwa jamaah yang tidak mendapat status tidak istitha'ah kesehatan, maka tidak dapat melakukan pelunasan BPIH.

Memang urusan umur Allah yang menentukan, namun tidak salahnya kita berusaha untuk lebih baik dan pada tahun 2018 Berdasarkan data

dari Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang diterima Media Center Haji (MCH), Rabu, 25 September 2018 pukul 10.50 waktu Arab Saudi (WAS), jumlah jamaah wafat mencapai 385 orang. Kilas balik, pada tahun 2017 jumlah jamaah yang wafat sebanyak 431 orang jamaah, artinya ada trend menurun. Kalau dilihat perkembangan terakhir khusus jamaah haji asal Kalsel hingga pasca pemulangan kloter terakhir pada tanggal 25 September 2018 tercatat yang meninggal dunia sebanyak 6 orang jauh menurun dibanding tahun 2017 yang meninggal dunia sebanyak 14 orang.

Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan (Puskes Haji Kemenkes) Eka Jusup Singka mengatakan, angka kematian jamaah haji tersebut memiliki banyak variabel. Pertama, karena kondisi jamaah sejak dari tanah air. Kedua, lingkungannya dan pola perilaku jamaah selama berada di Tanah Suci. Misalnya, jamaah kerap melakukan kegiatan yang tidak penting di luar kegiatan rukun haji.

Ada tiga hal yang membuat jamaah haji tidak memenuhi syarat istitha'ah kesehatan menurut Permenkes Nomor 15 tahun 2016. Hal itu diantaranya, penyakit yang bisa membahayakan jamaah haji itu sendiri, gangguan jiwa berat, dan penyakit yang tidak mungkin bisa disembuhkan.

Memang pemberlakuan istitha'ah kesehatan bagi jamaah haji bukan berjalan mulus begitu saja karena sebagian masyarakat menganggap bahwa pemerintah menghambat mereka untuk beribadah.

Perumusan istitha'ah menjadi fokus penting Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Kesehatan

(Kemenkes). Ketua Bidang Fatwa MUI, Prof Huzaemah T Yanggo, mengungkapkan istitha'ah berhaji terbagi dua, pertama adalah istitha'ah berupa bekal biaya baik selama berada di tanah suci atau bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Termasuk istitha'ah juga adalah kemampuan fisik yang didalamnya mencakup kesehatan.

Huzaimah menjelaskan, pembagian tersebut dalam Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah az-Zuhaili. Menurut Syekh Wahbah, istitha'ah terbagi dua, yakni kemampuan biaya dan ar-rohilah meliputi kemampuan kesehatan yang juga sangat penting dalam melaksanakan haji karena jika jamaah haji tidak memiliki kemampuan dalam segi kesehatan bagaimana bisa melaksanakan manasik dengan sempurna. Lebih lanjut Prof Huzaemah mengatakan, dalam kondisi sakit biasa yang bisa diobati atau penyakit menahun yang menyebabkan tidak bisa berangkat atau terhalang melaksanakan rukun dan wajib haji, orang tersebut bisa dibadhalhajikan.

Berdasarkan data yang disajikan pada bagian awal tulisan ini, ada 70% calon jamaah haji asal Kalsel yang dikategorikan risti. Artinya sangat memungkinkan di antara yang risti akan mengalami gangguan kesehatan mengingat pelaksanaan haji merupakan ibadah fisik. Kerja keras para petugas yang mendampingi jamaah telah membuahkan hasil maksimal walaupun dari segi jumlah tidak sebanding dengan jamaah yang dilayani, namun bermodalkan tekad kuat dan kerja ikhlas mereka pada tahun 2018 telah menghantar 3.820 jamaah haji kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat dan selamat.

10 Inovasi Baru untuk Ibadah Haji 2018

Oleh : H. Matnor



Indeks kepuasan jemaah haji terus meningkat tiga tahun terakhir, 2015 (82,67%), 2016 (83 83%), dan 2017 (84,85%). Pada 2018, Kementerian Agama menargetkan indeks kepuasan meningkat 0,15% menjadi 85% alias sangat memuaskan. Untuk itu, Kemenag meluncurkan 10 inovasi baru dalam pelaksanaan Haji 2018/1439 H untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, serta keamanan bagi para calon haji. Sepuluh inovasi ini merupakan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan bagi jemaah. Harapannya, mereka bisa beribadah

dengan tenang, memperoleh kemabruhan, serta kembali ke Tanah Air dalam kondisi sehat.

Inovasi pertama, rekam biometriks jemaah bisa dilakukan pada semua embarkasi haji di Indonesia. Momen 2018, Kemenag terus mengusahakan agar rekam biometrik yang mencakup data 10 sidik jari dan foto wajah jemaah haji bisa dilakukan di Indonesia. Inovasi ini akan memotong antrian dan masa tunggu yang sangat panjang saat pemeriksaan imigrasi jemaah, baik di Bandara Madinah maupun Bandara

Jeddah. Setibanya di bandara Madinah atau Jeddah, jemaah tinggal melakukan proses clearance (verifikasi akhir), berupa perekaman hanya satu sidik jari dan stempel paspor kedatangan. Bahkan, khusus embarkasi Jakarta - Pondok Gede (JKG), Jakarta - Bekasi (JKS), dan Embarkasi Surabaya (SUB), seluruh proses imigrasi, baik biometrik maupun clearance sudah dilakukan di Indonesia.

Kedua, QR code pada gelang jemaah yang berisi rekam data identitas jemaah yang dapat diakses melalui

KERABAT UTAMA

aplikasi haji pintar. Ini akan memudahkan petugas haji dalam mengidentifikasi dan membantu jemaah yang membutuhkan pertolongan.

Ketiga, sistem sewa akomodasi satu musim penuh di Madinah. Selama ini, sistem sewa seperti itu hanya diterapkan di Makkah. Di Madinah, sewa akomodasi dilakukan secara blocking time.

Mulai tahun ini, 52,02% jemaah akan ditempatkan di 32 hotel yang disewa satu musim penuh. Artinya, hotel menjadi hak jemaah Indonesia secara penuh tidak dibagi dengan negara lain.

Keempat, penggunaan bumbu masakan dan juru masak asal Indonesia. Kemenag minta kepada seluruh perusahaan katering untuk menggunakan bumbu asli dari Indonesia untuk menjaga cita rasa khas.

Kelima, layanan katering bagi jemaah haji Indonesia selama di Makkah ditambah dari 25 kali, tahun ini menjadi 40 kali. Selain itu, ada juga penambahan pemberian kelengkapan minuman dan makanan berupa teh, gula, kopi, saus sambal, kecap dan satu potong roti untuk setiap jemaah.

Keenam, penandaan khusus pada paspor dan koper, serta penggunaan tas kabin. Tanda warna ini juga sekaligus menun-

jukan sektor atau wilayah hotel dan nomer hotel tempat tinggal jemaah.

Ketujuh adalah pengalihan porsi bagi jemaah wafat kepada ahli waris. Tahun ini, Kemenag telah mengeluarkan regulasi baru bahwa jemaah wafat boleh digantikan ahli warisnya dengan syarat, jemaah tersebut wafat setelah ditetapkan sebagai jemaah berhak lunas pada tahun berjalan.

Kedelapan, pencetakan visa saat ini sudah bisa dilakukan oleh Kemenag. Inovasi ini sangat signifikan dalam mempercepat proses penyiapan dokumen keberangkatan jemaah.

Kesembilan, guna mengintensifkan layanan bimbingan ibadah, Kemenag tahun ini menempatkan satu konsultan di tiap sektor. Selama ini, konsultan ibadah hanya ada di kantor Daerah Kerja Makkah.

Kesepuluh, Kemenag membentuk tim Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (P3JH). Tim ini terdiri dari petugas layanan umum yang memiliki kemampuan medis untuk mendukung layanan kesehatan pada puncak haji.

Tidak puas di 10 inovasi ditahun 2018, Kemenag tampaknya tidak main-main untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun depan dan telah menyiapkan 8 inovasi haji tahun 2019.

Pertama, fast track (jalur cepat) imigrasi, akan diberlakukan kepada seluruh jemaah di 13 embarkasi dengan pembentukan kelompok terbang (kloter) jemaah akan dilakukan sejak awal. Konfigurasi manifest di pesawat sudah diatur, berdasarkan regu dan rombongan, tidak diserahkan kepada daerah. Berdasarkan evaluasi tahun ini, kebijakan pengaturan sejak awal itu dilakukan agar jemaah tidak terpecah saat memasuki jalur cepat imigrasi.

Kedua, sistem sewa hotel di Madinah seluruhnya akan menggunakan full musim dengan diharapkan bisa mengatur dan memastikan penempatan jemaah sejak awal dengan meminimalkan ketergantungan dengan majmuah.

Ketiga, terkait dengan Armuzna. Pada tahun ini jumlah tenda sangat terbatas, bahkan ada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang mengkaluping tenda. Dibutuhkan kejelasan dan ketegasan sikap petugas dan kedepan tenda harus ada nomor, sehingga tidak ada lagi saling klaim.

Keempat, yang tidak kalah penting adalah revitalisasi Satuan Tugas Operasional Armuzna. Tahun depan menggunakan pemetaan yang jelas, kualifikasi, komposisi dan jumlah petugas setiap pos.

Kelima, mempermudah

ibadah haji. Ibadah haji dapat menggunakan pendapat yang paling mudah sepanjang ada landasannya.

Keenam, intensifkan sistem laporan haji terpadu, pelaporan dengan cara manual harus segera ditinggalkan dengan aplikasi harus segera dibangun

dengan sistem informasi terintegrasi dengan kloter maupun non-kloter.

Ketujuh, strukturisasi kantor daerah kerja (daker). Kantor daker harus segera bisa dioptimalkan dengan sistem layanan terpadu sehingga seti-

ap orang dapat terlayani dengan baik.

Terakhir kedelapan, bidang kesehatan diperhatikan dari hulu. Sehingga rekam kesehatan jemaah terintegrasi dengan sistem aplikasi terpadu, juga monitoring kesehatan jemaah haji sejak awal dilakukan

10 Inovasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1439 H/2018 M





PERCEPATAN KEIMIGRASIAN
Rekam biometrik jemaah dilakukan di embarkasi haji sehingga masa antrian di Bandara Saudi tidak lama. Antrian yang sebelumnya 5 jam menjadi 1-2 jam.



QR CODE PADA GELANG JEMAAH
QR Code pada gelang jemaah yang berisi rekam data identitas jemaah sehingga bisa diakses melalui aplikasi haji pintar. Ini memudahkan petugas mengidentifikasi jemaah yang butuh bantuan.



AKOMODASI
Sistem sewa akomodasi satu musim penuh untuk sebagian hotel (52,02% jemaah) di Madinah. Selama ini, sewa akomodasi dilakukan secara blocking time. Dengan begitu, pemindahan jemaah dari Madinah ke Makkah atau sebaliknya, dapat dilakukan dengan memperhatikan kenyamanan jemaah.



BUMBU MASAKAN INDONESIA
Penggunaan bumbu masakan dan juru masak (chef) asal Indonesia. Selain untuk menjaga cita rasa khas kuliner Indonesia, ini juga untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke luar negeri.



PENAMBAHAN KATERING MAKKAH
Layanan katering bagi jemaah haji Indonesia selama di Makkah ditambah. Kalau sebelumnya hanya 25 kali, tahun ini menjadi 40 kali. Sementara dana living cost sebesar SAR1500, tetap diberikan sebagaimana biasa sehingga bisa digunakan jemaah untuk keperluan lainnya.



TANDA PASPOR DAN KOPER
Paspur dan koper jemaah diberi tanda khusus warna-warni. Inovasi ini mempermudah identifikasi paspor dan menghindari tertukarnya koper jemaah, memudahkan pengelompokan, menunjukkan sektor/wilayah hotel dan nomor hotel tempat tinggal jemaah.



PENGALIHAN PORSI WARIS
Pengalihan porsi bagi jemaah wafat kepada ahli waris. Sebelumnya, porsi jemaah wafat tidak bisa digantikan sehingga uangnya ditarik kembali oleh ahli waris. Jika akan digunakan untuk mendaftar, maka ahli waris terhitung dalam antrian baru.



PENCETAKAN VISA
Pencetakan visa sudah bisa dilakukan oleh Kemenag. Hal ini akan mempercepat proses penyiapan dokumen keberangkatan jemaah. Sebelumnya, Kemenag harus menunggu visa dari Kedutaan Saudi sehingga tidak jarang prosesnya menjadi lebih lama.



KONSULTAN IBADAH
Penempatan satu konsultan ibadah di tiap sektor, tidak hanya di kantor Daker (Daerah Kerja) Makkah. Konsultan ini diharapkan bisa bersinergi dengan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) yang ada di tiap kloter.



P3JH
Membentuk tim Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (P3JH) untuk membantu layanan kesehatan pada puncak haji, utamanya pada hari pertama lontar jumrah. Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, banyak jemaah yang membutuhkan pertolongan kesehatan di areal Jamarat menuju Mina.



 @Kemenag_RI

 Kementerian Agama RI

 @Kemenag_RI

 Kementerian Agama

FOTO KERABAT



Proses Kedatangan Jamaah Calon Haji (JCH)
di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin



Proses Penerimaan JCH di Aula Mekkah Asrama Haji
Embarkasi Banjarmasin



Pemeriksaan Kesehatan JCH



Penyerahan Dokumen



Pembekalan Materi Petugas Haji



Peragaan Manasik Haji

Dokumentasi Kegiatan JCH Selama Berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin Fase Keberangkatan



Proses Pemeriksaan Barang JCH



Menag RI membuka secara resmi kegiatan Rakerwil di dampingi Ka.Kanwil Kemenag Kalsel.



Proses Pelepasan/Keberangkatan JCH di Aula Jeddah Asrama Haji Embarkasi/Debarkasi Banjarmasin



Gubernur Kalsel melepas secara resmi Keberangkatan JCH Kloter 1 Embarkasi Banjarmasin



Ka.Kanwil Kemenag Kalsel melepas secara resmi keberangkatan JCH di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

Buka Rakernas Evaluasi Haji, Menag Ingatkan Pentingnya Inovasi



Jakarta (Kemenag)---Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membuka gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Penyelenggaraan Ibadah Haji 1439H/2018M di salah satu hotel di bilangan Jalan KH.Hasyim Ashari, Jakarta Pusat, Selasa (02/10).

Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 1439/2018M ini mengusung tema Syukuri Haji dengan Terus Berinovasi. Rakernas dihadiri Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI Ronny F Sompie, Dirjen PHU Kemenag Nizar Ali, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher, Kepala Biro HDI Mastuki, perwakilan K/L, sejumlah Kakanwil Kemenag

dari berbagai provinsi di Indonesia dan pejabat Ditjen PHU Kemenag.

Menag Lukman Hakim dalam sambutan dan arahan saat pembukaan mengatakan, Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 1439/2018M merupakan salah satu cara untuk mensyukuri apa yang sudah dilakukan dan didapatkan dari penyelenggaraan ibadah haji.

"Cara kita bersukur itu dengan senantiasa berinovasi. Jadi inovasi yang kita lakukan hakikatnya adalah bentuk syukur atas segala capaian yang telah diraih. Selaku Menteri Agama dan Amirul Hajj saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada beberapa pihak

yang sudah memberikan sumbangsih dan kontribusi yang sangat bermakna bagi kesuksesan penyelenggaraan haji tahun ini tentu ditengah berbagai kelemahan," kata Menag mengawali sambutan.

Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 1439/2018M yang digelar selama dua hari (2-4 Oktober 2018) ini diikuti sebanyak 164 peserta yang berasal dari Kakanwil Kemenag se Indonesia dan jajaran Ditjen PHU. Salah satu poin yang akan dibahas dalam Rakernas ini adalah berbagai kelemahan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018 serta mempersiapkan inovasi untuk tahun 2019.

Menurut Menag capaian yang diraih dari penyelenggaraan haji tahun 1439/2018M diantaranya andil yang sangat besar berupa bantuan dan fasilitas dari pemerintah kerajaan Arab Saudi Arabia. Begitu juga tidak kalah pentingnya adalah kerja sama yang sangat baik dari jemaah haji Indonesia.

Kerja sama yang baik dari jemaah memiliki signifikasi yang sangat besar dibalik sukses haji Indonesia tahun ini. Jemaah haji Indonesia, lanjut Menag dengan ketatan dan sikap disiplin serta kepatuhan menjalani regulasi yang dibuat Kemenag telah memberikan kontribusi atas kelancaran dan keberhasilan haji tahun ini. Koordinasi

kerjasama sinergisitas antara sejumlah kementerian dan lembaga yang ada saat berada di tanah suci juga menjadi faktor suksesnya penyelenggaraan haji tahun 1439/2018M.

"Inti dari Rakernas adalah melakukan evaluasi terhadap 10 inovasi yang sudah kita terapkan pada haji tahun ini dan merencanakan serta mempersiapkan 8 inovasi yang akan kita laksanakan di tahun 2019. Jadi beberapa inovasi baru yang akan kita lakukan tahun depan antara lain terkait dengan Fast Track proses imigrasi pada 13 embarkasi di tanah air," kata Menag.

"Fast Track proses imigrasi tahun ini hanya diberlakukan di bandara Soekarno-Hatta. Ta-

hun depan kita berharap dapat dilakukan pada 13 embarkasi dan tantangan kedepan kita harus bisa menyakinkan pihak Imigrasi Arab Saudi," sambung Menag.

Selain akan memberikan kepastian kepada jemaah haji terkait ketersediaan tenda di Arafah dan Mina, penempatan jemaah yang tidak jauh dari Masjid Nabawi, Menag menambuhkan inovasi lain yang akan dilakukan adalah sistem pelaporan berbasis digital. Dalam Rakernas tersebut Menag memberikan penghargaan kepada pemerintah kerajaan Arab Saudi atas kerja sama yang terjalin dengan baik sehingga penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini dapat berjalan dengan sukses.

Kemenag Kaji Pola Penempatan Jemaah di Makkah Berbasis Embarkasi

Yogyakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama tengah mempersiapkan operasional penyelenggaraan haji 1440H/2019M. Beragam inovasi dicanangkan, salah satunya terkait strategi penempatan jemaah haji di Makkah.

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji kemungkinan penempatan hotel jemaah di Makkah berbasis pada embarkasi. Artinya, akan dilakukan zonasi penempatan berdasarkan embarkasi.

"Dalam konsep ini, tidak ada pengundian hotel (qurah) di Makkah. Penempatan hotel jemaah berdasarkan embarkasi," ujar Sri Ilham di Yogyakarta, Sabtu (29/09).



Sri Ilham mengaku sudah membuat konfigurasi penempatan jemaah berdasarkan data jumlah kloter dan kapasitas hotel tahun 2018. Nantinya, jemaah yang berangkat dari 13 embar-

kasi akan dibagi penempatan-nya ke dalam tujuh wilayah di Makkah, yaitu: Mahbaz Jin, Raudlah, Rei' Bakhshy, Jarwal, Aziziah, Syisyah, dan Misfalah.

Biometrik Visa Umrah, Kemenag Minta Saudi Pertimbangkan Kemudahan Akses Jemaah

Jakarta (Kemenag) --- Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim mengatakan, pihaknya menghormati kebijakan baru yang diterapkan Saudi Arabia dalam penerbitan visa umrah. Namun, Arfi meminta agar pihak Saudi Arabia juga mempertimbangkan kemudahan akses jemaah umrah terhadap kebijakan tersebut.

"Kami menghormati dan memahami kebijakan pemerintah Saudi Arabia untuk penerapan biometrik sebagai syarat proses visa umrah. Tapi, mohon pertimbangkan kemudahan akses jemaah," terang Arfi Hatim usai menerima perwakilan peserta Aksi Damai Jamaah Umrah Indonesia Menolak VFS-Tasheel di Kantor Kemenag Jakarta, Rabu (03/10).

Aksi ini diikuti sejumlah pimpinan penyelenggara perjalanan travel umrah (PPIU).

Diinformasikan, Saudi Arabia telah mengeluarkan kebijakan baru dalam penerbitan umrah. Kebijakan itu berupa penerapan rekam biometrik sebagai syarat dalam pembuatan visa umrah. Rekam biometrik itu dilakukan di 34 kantor yang akan dibuka di Indonesia.

Peserta Aksi Damai Jamaah Umrah Indonesia Menolak VFS-Tasheel menilai kebijakan rekam biometrik ini memberatkan. Sebab, kantor layanannya masih terbatas, sementara jemaah umrah Indonesia tersebar hingga pe-



losok daerah.

Untuk itu, peserta aksi menuntut agar kebijakan tersebut ditolak. Mereka meminta kebijakan penerbitan visa umrah dikembalikan seperti sebelumnya, terpusat di Jakarta. Adapun rekam biometrik, dilakukan di terminal kedatangan Saudi Arabia.

Terkait tuntutan ini, Arfi mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk membahas hal ini dengan Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA) di Indonesia. Menurutnya, apapun kebijakan Saudi Arabia, harapannya itu tidak memberatkan, menyulitkan, dan membebani masyarakat yang akan beribadah umrah.

"Pihak Saudi perlu diberi pemahaman bahwa kondisi geografis Indonesia sangat luas.

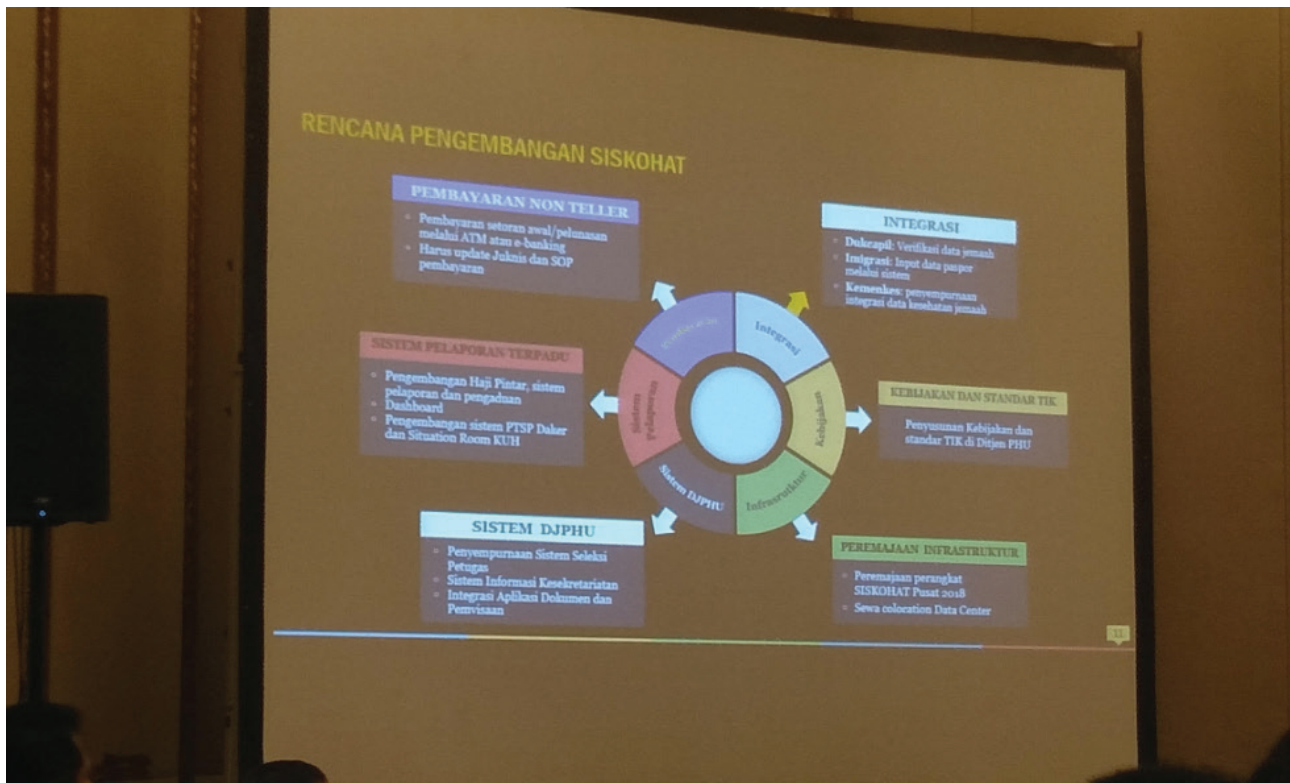
Jika kantor layanan rekam biometrik ini terbatas, tidak menjangkau hingga daerah, maka kebijakan ini justru akan memberatkan dan menambah cost," ujarnya.

"Kemenlu rencananya akan bersurat ke KBSA agar mempertimbangkan kembali atau menunda," sambungnya.

Arfi juga berharap, proses yang sudah berlangsung selama ini tetap berjalan. Kalaupun harus diterapkan, maka pada tahap awal dia mengusulkan agar rekam biometrik dilakukan di bandara Indonesia saja, ketika jemaah akan berangkat umrah.

"Atau, Saudi membuka tempat pengambilan biometrik di semua kab/kota sehingga memudahkan masyarakat Indonesia," tandasnya. (Ali M)

Kemenag Rencanakan Pengembangan Sistem Pembayaran Non Teller Haji



Yogyakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama berkomitmen untuk terus mengembangkan Sistem Informasi dan Komunikasi Haji Terpadu (Siskohat). Salah satu yang direncanakan adalah pengembangan sistem pembayaran non teller saat pendaftaran dan pelunasan haji.

Rencana ini disampaikan oleh Direktur Pengelolaan Dana Haji Ramadhan Harisman saat menjadi pembicara pada Evaluasi Pelayanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi Darat Jemaah Haji di Arab Saudi 1439H/2018M di Yogyakarta.

Evaluasi ini diikuti para Kabid Haji Kanwil Kemenag se Indonesia, Kepala Sektor di Makkah dan Madinah, serta pejabat Ditjen Penyelenggara

raan Haji dan Umrah. Evaluasi berlangsung tiga hari, 28 - 30 September 2018.

"Dengan sistem ini, kami berharap ke depan, jemaah saat membayar pendaftaran dan pelunasan biaya haji, tidak perlu antri di bank, tapi bisa melalui atm, sms banking, atau internet banking," ujarnya di Yogyakarta, Sabtu (29/09).

"Struk pembayarannya, bisa jadi bukti bayar atau lunas untuk dibawa ke Kankemenag. Di Kankemeng akan kita siapkan alat verifikasi," sambungnya.

Menurut Ramadhan, jika sistem ini sudah berjalan, maka waktu pembayaran dan pelunasan biaya haji tidak harus mengikuti jadwal buka layanan

di bank. Terobosan ini akan mempermudah akses jemaah, termasuk di daerah yang belum ada layanan syariahnya.

"Ini akan terus kita kembangkan dan dibahas bersama regulasi dan sop-nya dengan pihak perbankan," tandasnya.

Inovasi Haji 2019, Kemenag akan mengembangkan aplikasi sistem pelaporan. Dengan demikian, ke depan, proses pelaporan yang dilakukan oleh petugas kloter, sektor, dan daerah tidak lagi dilakukan secara manual.

"Inovasi ini akan mulai dikembangkan di bulan Oktober. Harapannya, awal tahun 2019 sudah bisa dilakukan ujicoba," harapnya.

Lepas JCH, Gubernur Imbau Jemaah Fokus Ibadah

Banjarbaru (Kemenag Kalsel) - Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor melepas secara resmi Jemaah Calon Haji (JCH) embarkasi Banjarmasin, Kamis (19/07/18).

Gubernur dalam sambutannya mengimbau JCH agar berangkat dengan hati ikhlas dan menetapkan niat untuk beribadah. "Fokus terhadap kegiatan ibadah haji," imbaunya.

Selanjutnya gubernur mengingatkan JCH agar menjaga situasi kondusif sesama JCH dan jemaah lainnya untuk memudahkan dalam beribadah. "Jangan malu untuk bertanya jika tidak tahu," pesannya.

Imbauan serupa juga disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Ka.Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel H. Noor Fahmi agar JCH mengurangi aktivitas fisik diluar ibadah atau aktivitas yang berlebihan. "Utamakan ibadah yang wajib dari yang sunnah atau yang sifatnya afdholiah kalau tidak memungkinkan," pesannya.

Selain itu JCH juga diimbau untuk istirahat dengan tidur yang cukup, memakai pelindung ketika beraktivitas di luar ruangan, makan makanan bergizi, dan menjaga pola hidup bersih.

"Perbanyak minum air putih dan jangan menunggu haus, minimal 200cc setiap dua jam," pesan menteri kesehatan dalam sambutan tertulisnya.

Kloter perdana BDJ 01 asal Kota Banjarmasin berjumlah 323 JCH dan Petugas den-

gan rincian 315 JCH, 3 TPHD dan lima orang petugas yang mendampingi jemaah.

Seyogyanya jumlah JCH dan petugas kloter ini utuh 325, namun ada satu orang jemaah sakit dan pendampingnya mutasi ke kloter berikutnya untuk menjalani perawatan di rumah sakit Ratu Zaleha.

Selama berada di Asrama Haji, JCH mengikuti berbagai kegiatan terkait persiapan menjelang keberangkatan, diantaranya pemeriksaan kesehatan, proses penyerahan dokumen (seperti penyerahan paspor, uang living cost, pemasangan gelang jemaah) ditambah proses Foto Biometrik dan Sidik Jari dari Imigrasi Arab Saudi.

Sebelumnya, pengambilan photo beometrik dan sidik jari pihak imigrasi Arab Saudi dilakukan sesaat setelah para JCH mendarat di Bandara Saudi Arabia dan para JCH harus ngantri berjam-jam menunggu giliran. Atas pertimbangan hal tersebut inisiatif Kementerian Agama untuk meminta pengambilan photo beometrik dan sidik jari dilaksanakan di embarkasi agar para JCH ada kesempatan untuk menikmati istirahat.

Melihat dari proses penerimaan JCH BDJ 01 asal Kota Banjarmasin pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 15.00 Wita kemaren hampir tidak ditemui JCH yang



udzur dan harus mendapat bantuan petugas. Perkembangan positif pada tahun ini merupakan dampak kebijakan wajib istithoah kesehatan bagi calon jemaah haji (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithoah Haji).

Kloter perdana asal JCH seribu sungai Kota Banjarmasin akan diberangkatkan pada tanggal 19 Juli 2018 pukul 14.35 Wita dan akan tiba di Bandara AMMA Madinah pada tanggal 19 Juli 2018 pada pukul 19.35 WAS dengan menggunakan Pesawat Garuda Indonesia Air Bus 330 Seri 200 dengan nomor penerbangan GIA 8101.

Direncanakan Kloter BDJ 02 gabungan JCH asal Kabupaten Tapin (206 JCH), Kabupaten Tabalong (82 JCH), Kabupaten Banjar (30 JCH) dan 2 orang Petugas Haji Daerah akan memasuki Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin pada tanggal 20 Juli 2018 pada pukul 08.00 Wita dan akan diberangkatkan pada esok harinya tanggal 21 Juli 2018 akan diberangkatkan menuju Madinah Arab Saudi pada pukul 06.35 Wita. (Rep/ Ft: Inmas18)



Rekam Biometrik di Embarkasi, Jemaah Tidak Lagi Antri di Bandara Arab Saudi

Banjarmasin (Kemenag Kalsel) - Rekam data biometrik dan sidik jari jemaah haji tahun 2018 tidak lagi dilakukan di bandara Mekah dan Madinah, tapi dilakukan di 13 embarkasi se Indonesia, termasuk embarkasi Banjarmasin.

"Kebijakan ini memangkas waktu verifikasi di bandara kedatangan, sehingga jemaah tidak perlu antri berjam-jam," kata Kepala Kantor Wilayah (Ka.Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel H. Noor Fahmi.

Lebih lanjut Lukman mengatakan rekam biometrik itu termasuk rekam sidik dan dokumen penting lain untuk perjalanan haji yang kini bisa

dilakukan di asrama haji di Tanah Air.

Kebijakan rekam biometrik tersebut menurut Fahmi dirasa akan memberi dampak positif bagi Jemaah Calon Haji yang mungkin kelelahan setiba di Saudi setelah menjalani penerbangan dari Tanah Air.

"Setiba di Saudi JCH tinggal mengurus legalisasi stempel paspor dan langsung menuju bus," terangnya saat memberikan sambutan di acara Manasik Haji Massal 1 JCH Banjarbaru tahun 1439 H/ 2018 M Selasa (03/07/18) di aula Linggang Intan DPRD Banjarbaru.

Selanjutnya Fahmi mengimbau agar JCH tidak membawa barang yang dilarang untuk dibawa dan apabila ditemukan

akan ditinggalkan di Asrama Haji. "Perhatikan betul-betul ketentuan barang apa saja yang tidak boleh dibawa," pesannya kepada 143 JCH Banjarbaru peserta manasik.

Di akhir sambutannya, Fahmi mengingatkan petugas tim kesehatan kab/Kota memperhatikan kesehatan JCH sejak di daerah dan jika tidak memungkinkan untuk berangkat jangan sampai tetap diberangkatkan. "Jangan sampai tiba di asrama dinyatakan tidak bisa berangkat," tukasnya.

JCH Banjarbaru yang berjumlah 143 orang tergabung dalam kelompok terbang 13 di gelombang II pemberangkatan. (Rep/ Ft: Inmas18)

Dirjen PHU Dukung Peningkatan Status Bandara Syamsuddin Noor

Banjarmasin (Kemenag Kalsel) - Status bandara Syamsuddin Noor Banjarbaru yang masih belum best-ndar internasional akan dievaluasi Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah.

"Dan kalau tidak kunjung berstatus bandara internasional, bisa saja didelete sebagai embarkasi haji," kata Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, Prof Dr Nizar Ali di sela acara pengukuhan Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) embarkasi Banjarmasin di Asrama Haji, Landasan Ulin di Banjarbaru, Jum'at (06/07/18).

Keberadaan bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin di Banjarbaru, sebagai embarkasi haji terancam 'didelete' atau dihapus karena belum berstatus sebagai bandara internasional, karenanya Nizar mendukung peningkatan status bandara yang saat ini sedang dilakukan pihak bandara Syamsuddin Noor.

"Maksudnya dievaluasi kita akan dorong agar daerah di Banjarmasin tetap bisa menaikkan status bandaranya ke internasional karena standar embarkasi adalah bandara internasional. Nanti kalau gak gitu bisa menjadi iri daerah lain," kata Dr Nizar Ali.



Dia mengatakan, sementara jatah kuota haji dan kelompok terbang (kloter) dari Banjarmasin tidak dikurangi meski status bandaranya belum internasional. "Maka itu kami dorong, dan haru segera diperjuangkan agar segera diurus izinnya naik kelas menjadi bandara internasional," kata dia.

Sementara Asisten III Pemprov Kalsel, Syamsir Rahman mengatakan evaluasi itu dorongan agar status bandara cepat internasional. "Insha Allah tahun ini izinnya selesai, dan sudah berstatus bandara internasional" kata Syamsir Rahman.

Sebelumnya. Kepala Kantor Wilayah (Ka.Kanwil) Kemenag Kalsel H. Noor Fahmi menyampaikan Tahun 2018 ini jamaah haji Kalsel, 3.831 orang yang terbagi dalam 12 kloter dan embarkasi Banjarmasin akan memberangkatkan 17 kloter yang lima kloter diantaranya dari Kalteng.

Menurut Ka.Kanwil, pemberangkatan pertama masuk asrama tanggal 18 dan berangkat tanggal 19 Juli 2018. "Gelombang pertama, Kloter 1 dari Banjarmasin," katanya. (Rep/ Ft: Inmas18)

Tiba di Bandara, Jemaah Haji Sujud Syukur



Banjarbaru (Kemenag Kalsel) - Suasana haru mewarnai jemaah haji Kalsel yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) pertama, saat menginjakkan kaki kembali di Banua, Kamis (30/08/18).

Setelah pesawat Garuda Indonesia Air Bus seri 200 mendarat, sebanyak 323 jemaah haji yang turun melalui tangga, beberapa di antaranya sujud syukur di landasan pacu.

Tidak ketinggalan, di antara mereka yang sujud syukur adalah Wakil Walikota Banjarmasin H.Hermansyah. "Semua proses ibadah lancar. Meski di terpa panas dan badai sewaktu pelaksanaan ibadah haji," kata Hermansyah.

Menjalani ibadah haji dengan ikut rombongan masyarakat, ia tetap merasa nyaman. Menurutnya, pihak Kementerian Agama (Kemenag) telah mem-

berikan pelayanan yang layak untuk semua kalangan.

Berbeda dengan jemaah lainnya yang bisa sujud syukur dan melangkah secara normal, sebagian dari anggota rombongan harus dipapah atau digendong karena tidak kuat berjalan karena kondisi tua dan juga ada yang kelelahan.

Bahriah (65) salah satu yang membutuhkan pertolongan petugas untuk mengalah. Bahkan ada satu jemaah atas nama Aida, dilarikan ke Rumah Sakit Idaman Banjarbaru, dan malamnya, sekitar pukul 20.00 WITA, meninggal dunia. Namun, jemaah lainnya yang kondisi masih fit setiba di banua mengucapkan Alhamdulillah.

"Ini setelah Sembilan tahun menunggu-nunggu. Tahun ini berangkat haji juga." Kata Bahriah yang menggunakan kursi roda usai turun dari pe-

sawat.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Kalsel, Noor Fahmi mengatakan rencananya jemaah haji kloter pertama diinapkan satu malam di Asrama Haji. "Tidak ada keluarga yang menjemput di Asrama Haji. Jadi seluruh jemaah haji langsung diantar ke daerah masing-masing," terang Fahmi.

Kepulangan jemaah bakal difasilitasi Panitia Penyelenggara Haji Daerah secara serentak lengkap dengan barang bawaan jemaah.

Untuk kloter pertama, Fahmi memastikan secara keseluruhan aman-aman saja. Tidak ada yang meninggal, hanya saja ada yang sakit sebanyak 4 orang. "kalau yang sakit biasa, tetap dibawa ke asrama haji. Tapi tadi ada yang pingsan, langsung dirujuk ke RSUD ULIN," tandasnya. (Rep/ Ft: Inmas18)

Kemenag Banjarmasin Laksanakan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah



Banjarmasin (Kemenag Kalsel) – Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banjarmasin mengadakan kegiatan bimbingan perkawinan Pra nikah Angkatan I bagi Calon Pengantin Se Kota Banjarmasin, Selasa (24/07/18) di aula Bararakatan.

Kegiatan yang berlangsung 24 s.d 25 Juli 2018 tersebut menghadirkan 70 orang peserta yang terdiri dari calon pengantin dari lima Kecamatan se Kota Banjarmasin,

Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Angkatan I bagi Calon Pengantin se- Kota Banjarmasin Tahun 2018 bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada calon pengantin agar dapat memahami tugas dan fungsi suami istri un-

tuk membentuk keluarga Sakinah Mawaddaah Wa Rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin Ahmad Sya'rani.S.Ag mengatakan penyelenggaraan Bimbingan Perkawina Pra Nikah tersebut dimaksudkan agar peserta dapat memahami secara substansial seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.

“Keluarga bahagia bisa terwujud tergantung pada kesiapan dan kematangan kedua calon pengantin,” katanya.

Selanjutnya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin Muhammad Rofi’I,S.Ag, M.Pd.I mengatakan perkawinan

bukan hal yang statis tetapi penuh dinamika yang dipengaruhi banyak hal.

Menurutnya, banyak perkawinan yang gagal dalam mengarungi fase tersebut karena suami istri tidak menjalankan perannya dalam menghadapi tantangan tersebut.

“Saya harapkan Calon Pengantin bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan calon pengantin yang belum tahu cara mengelola keluarga,” ujar Rofi’i

Pada akhir kegiatan peserta memberikan refleksi kegiatan dan peserta menyatakan para calon pengantin memang sangat membutuhkan kegiatan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah. (Rep/ Ft: Humas)

Kemenag Banjarbaru Sambut Baik Pengadaan Kartu Nikah

Banjarbaru (Kemenag Kalsel) - Rencana pengadaan kartu nikah sebagai pengganti buku nikah yang sudah berjalan selama ini disambut cukup baik sejumlah pejabat fungsional dan struktural di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) kota Banjarbaru.

Hal itu seiring sudah berjalannya program Kemenag RI disekeliling daerah yang menerapkan penggunaan Kartu nikah sebagai pengganti Buku Nikah.

“Saya menyambut baik rencana kementerian agama pusat dengan membuat terobosan yang inovatif dan efektif, pasalnya dengan penerapan kartu nikah ini di harapkan mampu meminimalisir

pemalsuan buku nikah,” ungkap Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru H. Humaidi saat di jumpai di ruang kerjanya, Jum’at (16/11/18).

Kasus pemalsuan buku nikah memang jarang terjadi di wilayah kalimantan. Namun dengan penerapan kartu tersebut diharapkan bisa meminimalkan potensi pemalsuan juga, terjaminnya data para pasangan suami istri yang tercatat secara on line.

Di tempat terpisah Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarbaru Utara H. Rimy Herdian mengaku sangat bagus jika penerapan kartu nikah di segerakan bagi para pasangan suami istri.

“Kartu nikah adalah terobosan yang jitu, mengapa tidak di dalam kartu nikah memuat berbagai informasi penting tentang data pasangan, yang bisa di baca melalui barcode, bahkan sebelumnya kantor KUA Banjarbaru Utara juga menerapkan sistem barkode pada buku nikah pasangan,” ungkap Rymi.

Kartu nikah merupakan inovasi yang dianggap simpel bahkan fungsinya pun hampir sama seperti KTP dan dari beberapa sumber yang diperoleh tim Humas Kemenag menyebutkan, ada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) dengan data dua wajah yang ditayangkan beserta nama dan kapan nikah. (Rep/ Ft: Dialv)



Kemenag Banjar Gelar Sosialisasi Penyuluhan Perhajian



Martapura (Kemenag Kalsel) – Kementerian Agama (Kemenag) Banjar melalui Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) menggelar Sosialisasi Penyuluhan Perhajian, Senin (22/10/18) di Majelis Ta'lim Arrahmah Jalan Sekumpul Gg. Muhaimin Martapura.

Pimpinan Majelis Ta'lim Arrahmah Hj. Nafsiah, BA beserta jemaah pengajian menyambut baik kedatangan Ka.Kankemenag Banjar Drs. H. Izzudin, M. Ag, Kasi PHU H. Rimazullah, S. Ag, MM beserta rombongan dari JFU PHU dan Humas Kemenag Banjar.

Dalam sambutan sekaligus penyampaian materi Ka. Kankemenag menyampaikan, pijakan policy nasional tentang Penyelenggaraan ibadah haji adalah memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik

agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan lancar dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama, serta jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji secara mandiri sehingga diperoleh haji yang mabrur.

Lebih lanjut dijelaskannya, untuk mengatur penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah mengatur pengorganisasian penyelenggaraan haji dimana di tingkat kabupaten sebagai koordinator penyelenggaraan ibadah haji adalah Bupati dibantu Ka.Kankemenag Kab/Kota dan Kasi PHU sebagai Sekretaris.

“Melalui majelis ta'lim ini informasi sangat efektif dan secara langsung dapat diterima para jamaah,” ujarnya.

Sementara itu Kasi PHU Kemenag Banjar mengatakan, tujuan dilaksanakannya Sosialisasi Penyuluhan Perhajian

an Pada Majelis Ta'lim adalah agar jamaah majelis ta'lim lebih mengetahui dan memahami tentang peraturan/undang-undang dalam penyelenggaraan haji dan umrah dan isu aktual serta solusi perencanaan keuangan haji.

Selain itu di sela-sela kegiatan Kasi PHU menyampaikan, kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 4 kali pada bulan Oktober sesuai dengan jadwal yaitu, pada Majelis Talim Ushuluddin, Majelis Ta'lim As. Khadijatul Qubro-Reel, Majelis Ta'lim Arrahmah Jalan Sekumpul dan Majelis Ta'lim Nurul Iman Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kota.

“Adapun metode yang digunakan adalah secara langsung pada kegiatan di Majelis Ta'lim sekaligus mendengarkan materi dan diskusi dengan narasumber,” pungkasnya. (Rep:Hadi/Ft:Anjay)

Ka.Kankemenag: Ibadah Haji Merupakan Ibadah Fisik dan Mandiri

Rantau (Kemenag Kalsel) – “Ibadah haji merupakan ibadah fisik dan mandiri,” ujar Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.Kankemenag) Kabupaten Tapin H Mahrus, saat membuka secara langsung pertemuan Calon Jamaah Haji (CJH) Waiting List (Daftar Tunggu) Kabupaten Tapin 1440/2019. Selasa (13/11/18) di aula SMAN 1 Rantau..

Menuturnya, karena ibadah haji merupakan ibadah fisik dan mandiri, maka para CJH dituntut sejak awal, agar bisa belajar manasik dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perhajian itu sendiri. “Terutama yang berkaitan dengan kesehatan,” katanya.

Diharapkannya, dengan dilaksanakannya waiting list lebih awal, diharapkan para CJH bisa mempersiapkan

semuanya sejak awal, termasuk dalam hal menjaga kesehatan. “Semoga para CJH bisa belajar dan belajar lebih baik lagi tentang perhajian, sehingga pelaksanaan perhajian di tahun 2019 bisa terlaksana dengan baik,” harapnya.

Sementara Ketua Pelaksana Waiting List H Zainuddin mengatakan, tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut, agar CJH waiting list memahami tentang kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan ibadah haji, memahami tentang manasik haji, dan memberikan pengertian kepada CJH tentang pentingnya istito’ah. “Peserta Waiting List Kab. Tapin Berjumlah 150 orang,” kata H Zainuddin.

Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi kebijakan pemer-

intah tentang perhajian, yang disampaikan oleh Ka.Kankemenag Tapin, materi istito’ah kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kab Tapin dan Proses perjalanan ibadah haji oleh Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Tapin. (Rep/Ft: Very) Sementara Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU) Kemenag HSU H.Nasrullah.HR,MM yang turut mendampingi Ka.Kankemenag menegaskan agar para guru dan kepala madrasah dapat menjaga kepercayaan masyarakat dengan terus meningkatkan output dan outcomes.

H.Nasrullah menambahkan sebagai ASN memiliki hak dan kewajiban. “Pemerintah telah menunaikan hak kita melalui pembayaran gaji dan tunjangan, maka kewajiban kita melaksanakan tugas sepenuh hati,” tukas H.Nasrullah. (Rep: Lati-ful Ft: Raihan)



Ka.Kankemenag Harapkan Santri Bawa Pengaruh Baik



Kandangan (Kemenag Kalsel) – Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.Kankemenag) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) H. Saribuddin mengharapkan sateri tahfizul Qur'an Ponpes Raudatul Amin Gambah Dalam Kecamatan Kandangan bisa membawa pengaruh baik di kehidupan bermasyarakat.

Menurut H. Saribuddin santri yang sudah menghafalkan 30 juz Al-Qur'an hendaknya dapat membawa pengaruh yang baik untuk anak-anak yang lain yang belum di wisuda, agar mereka lebih giat lagi dalam menghafal al Qur'an.

"Selamat untuk para sateri yang di wisuda mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kalian dalam mencapai ridho Allah SWT, giatlah belajar dan semangat dalam menuntut ilmu untuk bekal di dunia dan di akhirat," ungkap-

nya pada acara Wisuda santri tahfizul Qur'an Ponpes Raudatul Amin Gambah Dalam Kecamatan Kandangan, Senin (22/10/18).

Selanjutnya H. Saribuddin menyampaikan berkaitan dengan wisuda Tahfidz al Quran, Kemenag HSS memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang bersifat keagamaan. "Saya berpesan kepada para pendidik agar lebih bersemangat lagi dan tetap sabar dalam membina peserta didik, terus tingkatkan mutu peserta didik, tumbuhkan potensi dan minat mereka untuk terus belajar agar terwujud pencapaian yang kita harapkan," pungkasnya.

Sementara Wakil Bupati Samsuri Arsyad, S.AP mengucapkan selamat kepada santri tahfizul Qur'an yang diwisuda. "Semoga melalui wisuda ini menjadi titik awal pengabdian para santri dalam memba-

ngun HSS yang agamis dalam rangka menciptakan HSS yang cerdas, inovatif, taknologis dan agamis sejahtera dunia akhirat," ucapnya.

Samsuri Arsyad juga mengatakan pada tahun 2019 Pemkab HSS telah mengalokasikan dana untuk pemberian beasiswa kepada para santri/santriwati untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dan keluar negeri. "Dana beasiswa nantinya akan kita Hibahkan Ke MUI HSS, untuk formatnya nanti akan di atur bersama-sama sehubungan dengan dana yang saat ini masih terbatas," katanya.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD HSS, Kabag Kesra HSS serta Camat Kandangan dan para sateri Tahfizul Qur'an Raudatul Amin Gambah Dalam. (Rep/ Ft: Bahrul)

Ka.Kankemenag : Rakerda Acuan Program Kerja dalam Pelaksanaan MTQ

Kotabaru (Kemenag Kalsel) – “Rapat Kerja Daerah (Rakerda) merupakan acuan program kerja yang dirancang dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ),” ujar Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.Kankemenag) Kabupaten Kotabaru H. Salman saat menghadiri Rakerda LPTQ se Kalimantan Selatan, Sabtu (29/09/18) di Pendopo Bersinar Tanjung.

Lebih lanjut Salman berharap kepada pengurus LPTQ Kalsel untuk menyiapkan program kerja setiap bidang. “Untuk penetapan tuan rumah MTQN tingkat provinsi tahun 2019 perlu juga ditetapkan pada Rakerda ini,” katanya.

Rakerda dibuka secara resmi Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor dalam sambutannya yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel H. Abdul Haris Makkie mengharap, Rakerda tersebut dapat berjalan dengan baik dan

menghasilkan keputusan bersama demi pengembangan LPTQ dalam meningkatkan baca tulis Al Qur’an khususnya di Kalsel. “Semoga kegiatan ini melahirkan rancangan kerja yang dapat meningkatkan prestasi para qari dan qariah kita,” harapnya.

Haris Makkie yang juga menjabat sebagai ketua umum LPTQ Kalsel menambahkan, Rakerda memberikan kesuksesan MTQN XXXI di Kabupaten Tabalong. “Sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi,” ucapnya.

Sebelumnya dalam sambutannya Bupati Tabalong H. Anang Syakhfiani sebagai ketua panitia penyelenggara MTQN XXXI tingkat provinsi mengatakan, daerahnya siap menyelenggarakan event tahunan ini yang akan dilaksanakan 02 s.d 09 Nopember 2018 nanti. “MTQ ini merupakan momentum Kabupaten Tabalong dalam membumikan Al Qur’an di

Bumi Sarabakawa,” ujarnya.

Selain itu ditambahkan, semua kebutuhan penunjang dalam penyelenggaraan MTQ telah maupun sedang dikerjakan panitia untuk kesuksesan pelaksanaan dan pembukaan akan dilaksanakan pada 02 Nopember nanti di Tanjung Expo Centre.

Selanjutnya diterangkan, untuk acara pawai ta’aruf yang biasanya seluruh peserta berjalan kaki, untuk MTQ di Tanjung peserta diajak keliling kota dengan menggunakan mobil hias. “Peserta Pawai Ta’aruf akan melewati tiga kecamatan, yakni Tanjung, Tanta dan Murung Pudak,” pungkasnya.

Berhadir pada Pelaksanaan Rakerda LPTQ Ka. Kanwil Kemenag Kalsel, pengurus LPTQ Kalsel, Ketua dan pengurus LPTQ Kabupaten/Kota dan Kepala Bagian Kesra Se Kalimantan Selatan. (Rep/Ft:Aan)



Kemenag HST Kaji PTSP Ke Kota Batu



Kota Batu (Kemenag Kalsel) - Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) melakukan pengkajian penerapan Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ke Kantor Kemenag Kota Batu Surabaya Jawa Timur, Senin (01/10/18).

Kepala Kantor Kemenag HST H. Saipudin yang didampingi Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) H. Khairussalim dan seluruh Kepala Seksi (Kasi) dan penyelenggara mengucapkan terimakasih kepada Kemenag Kota Batu atas kesediaannya menyambut dan memberikan kesempatan untuk pengkajian teknis pelaksanaan program PTSP yang sudah dilaksanakan di Kemenag Kota Batu.

“Kita tidak bisa melaksanakan program tersebut tanpa mengetahui bagaimana teknis memberikan pelayanan yang

begitu banyak hanya dengan satu pintu,” kata H. Saipudin.

Dikatakan H. Saipudin PTSP adalah suatu inovasi bagi Kementerian Agama dalam meningkatkan kerja dan meningkatkan pelayanan publiknya, makanya pihaknya akan mempelajari dan mengkaji sedalam-dalamnya mekanisme pelaksanaan program PTSP tersebut. “Baik dari segi sumberdaya pelaksanaannya, teknis pelayanannya dan penataan sarana prasarannya maupun hal-hal yang ada hubungannya dengan program tersebut,” katanya.

Terus terang katanya lagi, setelah masuk Ke Kankemenag Kota Batu pihaknya merasa sudah ada sedikit gambaran. “Kita tidak bisa menerka-nerka dan menghayal atau melihat video-video di youtube tanpa melihat langsung,” ujarnya.

Sementara Ka. Kanke-

menag Kota Batu H. Ahmad Nawawi dalam penjelasannya memaparkan secara gamblang terbentuknya PTSP pada Kemenag Kota Batu tersebut. “Komitmen dan koordinasi yang baik dari seluruh komponen akan sangat menentukan dalam mewujudkan PTSP,” katanya.

PTSP melibatkan seluruh pegawai dari semua seksi untuk ditempatkan di bagian back office yang ditugaskan secara bergilir guna mempermudah dan mempercepat pelayanan, ditambah beberapa orang khusus dibagian front office sebagian lagi sebagai petugas PTSP serta customer service yang membantu setiap ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

“Sampai hari ini, selama PTSP dilaksanakan 100% masyarakat menyatakan puas dengan pelayanan yang diberikan Kakemenag Kota Batu,” ungkap H. Nawawi (Rep.Fik/Ft.Ram)

Ka.Kankemenag: Laksanakan Tugas Dengan Penuh Disiplin dan Tanggungjawab

Amuntai (Kemenag Kalsel) - Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka Kemenag) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) H.Yusran menyampaikan pekerjaan sebagai ASN banyak sekali peminatnya, hal ini terbukti dengan membludaknya pelamar CPNS.

Karena itu dia meminta kepada seluruh ASN agar mewujudkan rasa syukurnya dengan professional dalam bekerja.

“Laksanakan tugas dengan penuh disiplin dan tanggung jawab,” tegas H.Yusran saat memberikan arahan pada pertemuan K2MI Kecamatan Sungai Pandan sekaligus pembinaan kepegawaian bagi Pendidik Tenaga Kependidikan

(PTK) MI se Kecamatan Sungai Pandan di MI Tambalang, Selasa (13/11/18).

H.Yusran menjelaskan untuk mau berubah menjadi lebih baik harus dimulai dari diri sendiri. “Biasakan berdisiplin dengan waktu,” ungkap H.Yusran.

Dia menjelaskan sebagai seorang ASN sesuai aturan dituntut untuk bekerja selama 37,5 jam dalam satu minggu. “Apalagi sebagai seorang pengajar apabila jam mengajar kurang dari 24 jam dalam seminggu akan bermasalah dalam pencairan Tunjangan Profesi Guru,” ungkap H.Yusran.

Sementara Kepala Seksi Pendidikan Madrasah

H.A.Rusyadi yang turut mendampingi Kepala Kantor Kemenag HSU menyampaikan di zaman serba teknologi saat ini semua informasi bergerak cepat.

“Kepada seluruh Kepala MI agar selalu mengaktifkan Whatssapp (WA) karena seringkali ada informasi yang bersifat mendadak dan harus segera disikapi,” kata H.A.Rusyadi.

Untuk itu dia meminta kepada para kepala MI agar memanfaatkan secara maksimal group WA yang ada. “Manfaatkan group WA untuk bertukar informasi seputar dunia pendidikan dan jangan terlalu banyak digunakan dalam hal candaan,” pesan H.Rusyadi. (Rep: Latiful/ Ft: Raihan)



Kemenag Tabalong Gelar Bimbingan Perkawinan Catin



Tanjung (Kemenag Kalsel) – Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tabalong melalui Seksi Bimas Islam menggelar bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Catin), Selasa (16/10/18) di aula Kankemenag Tabalong.

Ka.Kankemenag Tabalong H. Taufik Rahman, M.Pd menyebutkan, bimbingan perkawinan Catin atau biasa disebut Kursus Calon Pengantin (Suscatin) merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Menurutnya, langkah strategis tersebut merupakan ikhtiar pemerintah melihat fenomena perkawinan yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun justru angka perceraian semakin meningkat. “Kita sangat mengharapkan dengan Suscatin akan menurunkan resiko kegagalan dalam kehidupan pernikahan,” tandasnya.

Lebih lanjut Ka.Kankemenag mengharapkan, Catin bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh karena banyak pasangan Catin yang belum memahami cara mengelola keluarga. “Le-

wat pelaksanaan bimbingan perkawinan ini, para Catin akan mendapatkan dan memperoleh bekal, terlebih bekal apa yang harus mereka lakukan setelah berumah tangga nanti,” imbuhnya.

Selanjutnya H. Taufik menandakan, pernikahan adalah ibadah sehingga untuk suksesnya pelaksanaan rumah tangga menjadi keluarga Sakinah, Mawaddah Warahmah tentunya harus mengikuti petunjuk-petunjuk dari Rasulullah SAW. “Dalam pernikahan pasti akan ada riak-riak dan gelombang, untuk itu perlu ilmu agama agar riak-riak itu menjadi warna indah dalam pernikahan,” ucapnya.

Senada dengan pernyataan tersebut, Kasi Bimas Islam Kemenag Tabalong H. Mustafa Inani, MM juga menekankan, tujuan bimbingan perkawinan tersebut adalah untuk memberikan bekal kepada calon pengantin baru agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga secara benar, bahagia dan mampu mengatasi problematika yang timbul dalam kehidupan berumah tangga.

“Semoga program ini mampu memberikan sumbangan pembangunan SDM dalam aspek pembentukan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah dan mampu berkontribusi dalam mengurangi angka kegagalan dalam rumah tangga,” tandasnya.

Bimbingan perkawinan tersebut diikuti 30 pasang Catin. (Rep:Sry/Ft:Rudy)

Ka.Kankemenag Kukuhkan TIM Zona Integritas



Paringin (Kemenag Kalsel) - Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.Kankemenag) Kabupaten Balangan H. Muhammad Yamani mengukuhkan Tim Zona Integritas (ZI) Kankemenag Kabupaten Balangan. Pengukuhan yang disaksikan langsung seluruh jajaran pejabat struktural dan fungsional serta karyawan-karyawati Kankemenag Balangan tersebut dilaksanakan sekaligus Apel Kesadaran, Senin (17/09/2018).

Tim ZI diketuai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kankemenag Balangan H. M Fahmi Wahid dengan membawahi 6 tim terdiri dari tim manajemen perubahan, tim penataan tata laksana, tim penataan sistem manajemen SDM, tim penguatan akuntabilitas, tim penguatan pengawasan dan tim penguatan kualitas pelayanan.

Ka.Kankemenag dalam arahannya mengatakan, dengan dibentuknya tim tersebut, pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Kemenag dapat terlaksana sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pemberantasan korupsi dan terciptanya peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan menuju clean governance dan good government.

“Kankemenag Balangan ditunjuk dalam proyek kawasan zona integritas, dan ini wajib kita laksanakan sebaik mungkin,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan perlunya pembangunan Zona Integritas disemua satuan

kerja Kemenag, karena masih adanya masalah kesenjangan antara harapan masyarakat dengan layanan aparatur Negara. Disisi lain tambahnya, masyarakat semakin kritis, dimana mereka sudah mengerti akan hak-haknya dan mengerti juga bahwa ASN sebagai pelayan masyarakat.

“Makanya menjadi tuntutan bagi kita sebagai ASN, perlu merubah mind set selaku pelayan masyarakat dan abdi negara,” terangnya.

Selanjutnya selain mengukuhkan Tim ZI, dikesempatan tersebut Ka.Kankemenag juga mengukuhkan pengurus kelompok kerja penghulu yang diketuai Ahmad Gazali selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing Tinggi. (Rep/ Ft: Humas)

Kemenag Batola Terima 2ribu Buku Nikah



Marabahan (Kemenag Kalsel) - Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Barito Kuala (Batola) menerima 2ribu pasang buku nikah, Senin (12/11/18).

Buku nikah tersebut diserahkan Kasi Pemberdayaan KUA Kantor wilayah (Kanwil) Kemenag Kalimantan Selatan Drs. H. Yuliansyah, MM kepada Drs. H. Rusbadi, MA di kantor Kemenag Batola

Usai menyerahkan buku nikah H. Yuliansyah mengatakan semua yang mereka serahkan hari tersebut terdiri dari buku nikah (NA) 2000 pasang, duplikat buku nikah 250 pasang, Akta Nikah 2000 lembar dan Daftar Pemeriksaan nikah 2000 lembar.

Hal itu menurut Yuliansyah dalam rangka memenuhi kebutuhan buku nikah, duplikat buku nikah, akta nikah dan daftar pemeriksaan nikah sesuai kebutuhan

pelaksanaan pencatatan nikah serta untuk mewujudkan tata kelola blanko nikah yang baik,

Menurutnya Kanwil Kemenag Provinsi kalsel telah mengalokasikan pendistribusian blanko nikah kepada Kantor Kementerian Agama termasuk Batola. “Selanjutnya blanko nikah tersebut akan didistribusikan lagi oleh Kantor kemenag Batola ke KUA Kecamatan sesuai kebutuhan melalui Surat Keputusan,” tambahnya.

Kepala Kantor Kemenag Batola Drs. H. Rusbandi, MA mengatakan KUA Kecamatan harus menggunakan buku nikah yang bertanda tangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada setiap layanan pencatatan nikah, dan baru-baru ini kemenag RI meresmikan kebijakan untuk menghapus penggunaan buku nikah terhitung sejak 8 November 2018.

Sebagai pengganti, Kemenag meluncurkan kartu nikah yang dinilai lebih efisien untuk dibawa masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam melakukan proses administrasi sipil yang memerlukan catatan pernikahan.

“Kami dari kemenag ingin lebih simpel seperti KTP atau ATM yang lain, jadi itu bisa dimasukkan ke dalam saku, bisa disimpan di dalam dompet. Bisa memudahkan, ketika kita harus meregistrasi atau memerlukan catatan apakah kita sudah nikah atau belum dan seterusnya,” ujarnya.

Dalam penyebaran kartu nikah ia menerangkan, Kemenag menargetkan di tahun 2018 ini, akan mengeluarkan 1 juta kartu nikah pada pasangan yang menikah di tahun yang sama. “Bagi yang telah menikah pemberian kartu nikah akan dilakukan secara bertahap,” ujar Ka.Kankemenag Batola tersebut. (Rep/ Ft: Masgun)

Ka.Kankemenag Imbau ASN Tidak Terlibat Politik

Batulicin (Kemenag Kalsel) – Memasuki tahun-tahun politik, Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.Kankemenag) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) Drs. H. Abdul Basit, MM mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenag agar tidak terlibat dalam ranah politik.

Hal itu disampaikannya saat memberi arahan pada kegiatan kajian keagamaan rutin di Aula Kemenag, Selasa (30/10/18).

Dalam kesempatan itu, H.Basit juga mengatakan, ter-

kait audit yang direncanakan akan dilaksanakan di Kemenag Tanbu, untuk itu seluruh pihak dapat bekerjasama dalam menyajikan data dan laporan secara lengkap, transparan dan akurat. “Khususnya laporan kinerja ASN, karena yang diperiksa adalah kinerja tahun 2017 lalu,” ungkapnya.

Sebelumnya, kajian keagamaan dimulai dengan pembacaan surah yassin dan al-waqi'ah dari Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Drs. H. Umar, dimana disampaikannya agar seluruh ASN Kemenag dapat istiqomah

melaksanakan kajian keagamaan, sebagai bekal ilmu agama untuk mencapai ridho Allah SWT didunia dan akhirat.

Utamanya tambah H. Umar, sebagai pelayan umat beragama, sudah pasti ASN Kemenag menjadi contoh teladan bagi masyarakat, karena itu penguatan iman dan taqwa perlu diselenggarakan melalui kajian rutin, yang diharapkan dapat menjadikan kualitas ASN terus meningkat dalam hal melayani umat beragama. “Kegiatan ini juga diharapkan agar Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan bagi lembaga kita,” tuturnya.





Ketua beserta Pengurus dan Anggota DWP Kanwil Kemenag Kalsel Foto Bersama Nara Sumber (tengah) usai melaksanakan pertemuan rutin bulanan DWP Kanwil Kemenag Kalsel di Mushalla Ikhlâs.